



**DISAIN KELEMBAGAAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI
AIR (GHIPPA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI
KABUPATEN SITUBONDO**

PROPOSAL

TESIS

Oleh:
TAUFIQ AMIN
NIM. 130820201036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**DISAIN KELEMBAGAAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI
AIR (GHIPPA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI
KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS

**Oleh:
TAUFIQ AMIN
NIM 1308 2020 1036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**DISAIN KELEMBAGAAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI
AIR (GHIPPA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI
KABUPATEN SITUBONDO**

***INSTITUTIONAL DESIGN OF ASSOCIATION COMMUNITY WATER
USER FARMERS (ACWUF) IN THE MANAGEMENT OF WATER
RESOURCES IN SITUBONDO REGENCY***

TESIS

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2)
dan mencapai gelar Magister**

**Oleh:
TAUFIQ AMIN
NIM 1308 2020 1036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan Segala Keagungan dan Kuasa-Nya, sholawat dan salam senantiasa kami curahkan dan persembahkan kepada Nabi Muhammad Shallalahualaihiwasallam, Ya Rosulallah Ya Habiballah. Alhamdulillah, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan selanjutnya akan saya persembahkan untuk:

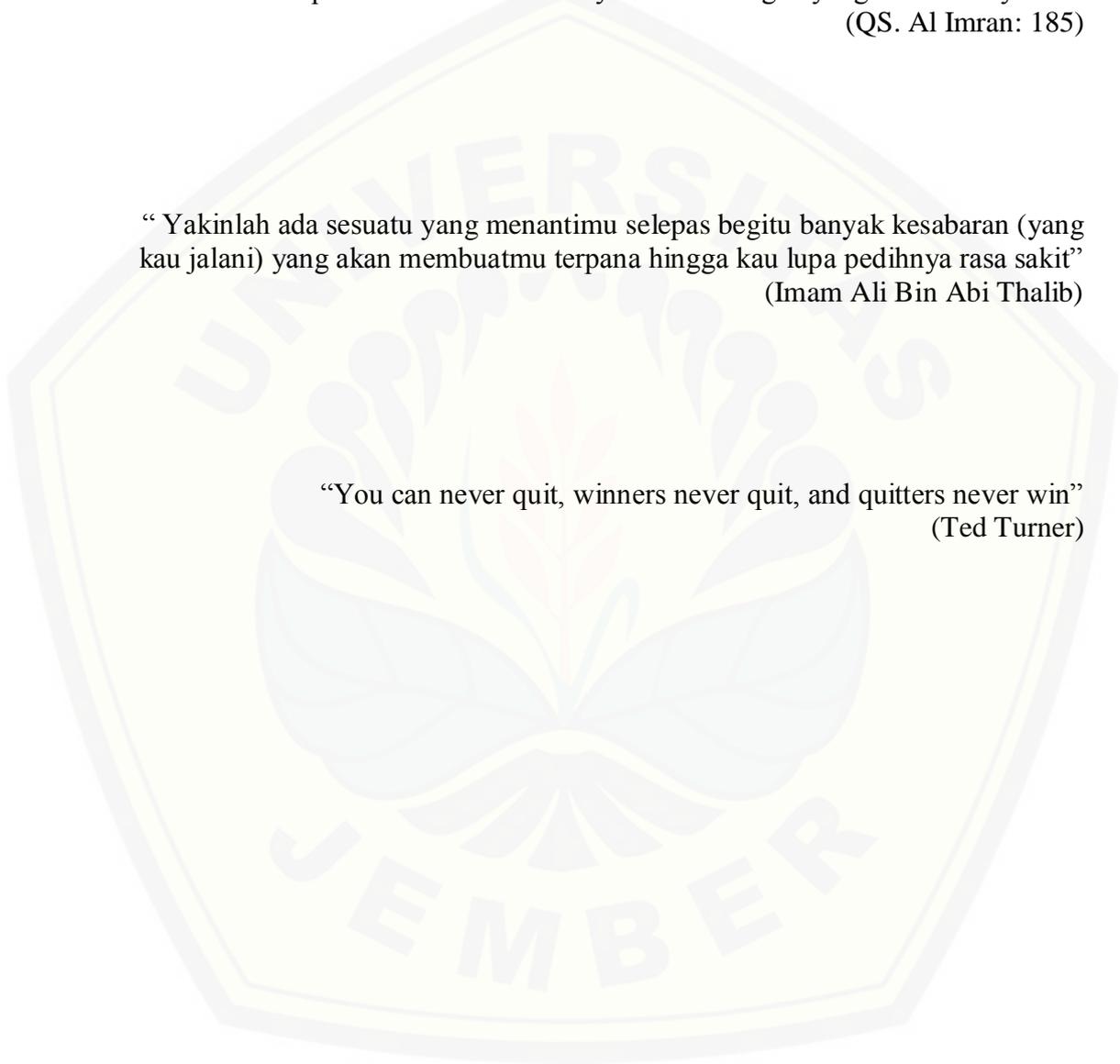
1. Kedua orang tuaku
2. Istriku tercinta, Prihandini Arie Santy
3. Anak kesayangan papa, Najmi Fatihus Shidqi dan Najmah Naurah Kamiliya
4. Almamaterku, Unej
5. Guru-guruku sejak TK hingga paskasarjana

MOTTO

“Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan”
(QS. Al Imran: 185)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas begitu banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”
(Imam Ali Bin Abi Thalib)

“You can never quit, winners never quit, and quitters never win”
(Ted Turner)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ AMIN

NIM : 1308 2020 1036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Situbondo”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2015

Yang menyatakan,

TAUFIQ AMIN
NIM 1308 2020 1036

TESIS

**DISAIN KELEMBAGAAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI
AIR (GHIPPA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI
KABUPATEN SITUBONDO**

***INSTITUTIONAL DESIGN OF ASSOCIATION COMMUNITY WATER
USER FARMERS (ACWUF) IN THE MANAGEMENT OF WATER
RESOURCES IN SITUBONDO REGENCY***

Oleh:
TAUFIQ AMIN
NIM. 1308 2020 1036

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Lilis Yulianti, SE, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan
Petani Pemakai Air (GHIPPA) Dalam
Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten
Situbondo
Nama : TAUFIQ AMIN
NIM : 1308 2020 1036
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah
Disetujui untuk diuji : 23 Desember 2015

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Lilis Yulianti, SE, M.Si
NIP. 19690718 199512 2 001

Pembimbing Anggota

Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002

Mengetahui/Menyetujui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Ilmu Ekonomi
Ketua Program Studi

Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002

PENGESAHAN

JUDUL TESIS

**DISAIN KELEMBAGAAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI
AIR (GHIPPA) DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI
KABUPATEN SITUBONDO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIQ AMIN

NIM : 1308 2020 1036

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Moh. Adenan, M.M
NIP. 19661031 199203 1 001
2. Sekretaris : Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si
NIP. 19700206 199403 1 002
3. Anggota I : Dr. Rafael Purতোমো Somaji, M.Si
NIP. 19581024 198803 1 001
4. Anggota II : Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si
NIP. 19690718 199512 2 001
5. Anggota III : Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)
Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Situbondo

TAUFIQ AMIN

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) merupakan kelembagaan lokal pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis dan berbadan hukum. Melalui Inpres no 3 Tahun 1999, Pemerintah membuat kebijakan terkait pembaharuan pengelolaan irigasi dengan menyerahkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A sebagai upaya pemberdayaan P3A dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) dan keberlanjutan irigasi. Pada aras ini, kemandirian P3A baik secara ekonomi maupun sosial menjadi landasan fundamental demi mewujudkan peran P3A dalam pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif. Gabungan HIPPA tunggal akan membentuk GHIPPA yang memiliki wilayah kerja pada saluran sekunder. Sedangkan HIPPA tunggal memiliki wilayah kerja pada saluran tersier. Koordinasi antara lembaga lokal pengelola air irigasi merupakan pondasi yang harus dibangun untuk dapat mewujudkan pengelolaan air irigasi yang mandiri.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola kelembagaan ekonomi antara GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA di Kabupaten Situbondo dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air dan merumuskan disain kelembagaan GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi diantara GHIPPA dan HIPPA merupakan sebuah koordinasi dalam pengelolaan air, namun masih tidak optimal dan kurang intens. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya program kerja yang terpadu antara GHIPPA dan HIPPA terkait pengelolaan sumberdaya air. Pengamatan dilapangan memberikan gambaran bahwa lembaga pengelola air yang terdapat di Kabupaten Situbondo masih kurang berperan dalam pengaturan air dan lebih didominasi oleh peran subblok sebagai operator dilapangan.

Kata Kunci: Disain kelembagaan, GHIPPA/GP3A, Pengelolaan, Sumberdaya air,

RINGKASAN

Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Situbondo, TAUFIQ AMIN, 1308 2020 1036; 2015: 90 halaman, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi pertanian. Pada titik ini, ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan beras dan makanan pokok lainnya menjadi sangat penting. Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menjadi 275 juta jiwa pada tahun 2025, maka untuk memenuhi produksi bahan makanan pokok berupa padi, sangat diperlukan jaringan irigasi (Salim, 2005). Keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan air sebagai salah satu faktor input yang mendukung proses produksi pertanian. Irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Dalam hal ini, dibutuhkan pengelolaan air yang mandiri dan partisipatif oleh kelembagaan lokal.

Upaya penerapan pengelolaan sumberdaya air yang partisipatif diwujudkan dengan pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). P3A atau HIPPA merupakan kelembagaan lokal pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis dan berbadan hukum. Melalui Inpres no 3 Tahun 1999, Pemerintah membuat kebijakan terkait pembaharuan pengelolaan irigasi dengan menyerahkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A sebagai upaya pemberdayaan P3A dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) dan keberlanjutan irigasi. Pada aras ini, kemandirian P3A baik secara ekonomi maupun sosial menjadi landasan fundamental demi mewujudkan peran P3A dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang partisipatif.

Gabungan HIPPA tunggal akan membentuk GHIPPA yang memiliki wilayah kerja pada saluran sekunder. Sedangkan HIPPA tunggal memiliki wilayah kerja pada saluran tersier. Koordinasi antara lembaga lokal pengelola air irigasi tersebut merupakan pondasi yang harus dibangun untuk dapat mewujudkan pengelolaan air irigasi yang mandiri.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola kelembagaan ekonomi antara GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA di Kabupaten Situbondo dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air dan merumuskan disain kelembagaan GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan potret yang menyeluruh (*holistic*) atas sebuah permasalahan yang ada untuk dicarikan solusinya. Pengambilan data primer menggunakan dua metode yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan metode *Focus Group Discussion* (*FGD*). Metode penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih secara sengaja yang dianggap mengetahui atau memberikan gambaran yang lengkap terhadap focus penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri atas 5 informan kunci yaitu ketua ataupun pengurus GHIPPA serta informan dari instansi terkait dan 3 informan tambahan yaitu ketua ataupun pengurus HIPPA tunggal.

Fokus penelitian ini adalah pada upaya penggalian data-data yang terkait kelembagaan GHIPPA dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air. Data sekunder diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian dan informasi lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pola kelembagaan GP3A/GHIPPA di Kabupaten Situbondo disusun oleh tiga komponen yaitu aturan formal, aturan informal dan sanksi sosial menjadi faktor yang mendasari pembentukan kelembagaan dalam pengelolaan air. Aturan formal yaitu berupa adanya landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air

(HIPPA), aturan informal yaitu nilai-nilai tradisional yang sudah berjalan di masyarakat seperti *ulu-ulu* air atau *lo benyo* dan mekanisme penegakan yaitu dengan adanya sanksi moril bagi petani yang melakukan penyalahgunaan air atau pengingkaran dalam membayar iuran air.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap posisi organisasi, maka GHIPPA berada pada kuadran III dimana posisi GHIPPA berada dalam kondisi yang lemah tetapi menghadapi peluang yang besar. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk menangkap peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh GHIPPA. Rumusan disain kelembagaan GHIPPA yang mandiri adalah:

1. Menyusun program kerja GHIPPA
2. Menerapkan program kerja yang telah disusun
3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja, Menyusun AD/ART setiap tahun
4. Memperbaiki AD/ART yang sudah tidak sesuai
5. Melakukan evaluasi AD/ART
6. Melaksanakan AD/ART yang sudah dibuat
7. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan organisasi agar sesuai AD/ART
8. Memberikan sanksi apabila terjadi pengabaian pelaksanaan AD/ART
9. Membangun usaha ekonomi lain sebagai sumber pendapatan GHIPPA, seperti membuka toko Saprodi Pertanian, membuka unit simpan pinjam dll
10. Mengakses bantuan dana pada Pemerintah untuk pembiayaan pemeliharaan saluran sekunder yang membutuhkan biaya besar
11. Membantu HIPPA untuk mengatur keuangannya, sehingga HIPPA memiliki kas dan dapat melakukan penyetoran pad akas GHIPPA

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Perubahan Ekonomi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo: Studi Biaya Transaksi, Modal Sosial dan Dinamika Pendapatan”. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Saya menyadari tesis ini merupakan karya kecil yang Saya harapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkannya. Dalam pelaksanaan penelitian hingga proses penulisan tesis ini, penulis telah mendapat banyak sekali bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Lilis Yulianti, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) serta Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis serta mau meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), atas curahan perhatian, pikiran, kesempatan dan kesabaran kepada penulis sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan baik.
3. Dr. Moh. Adenan, MM selaku Ketua tim penguji, Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si dan Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si selaku Dosen Penguji atas saran dan masukannya kepada penulis untuk perbaikan tesis ini sehingga tesis ini dapat dikemas dengan baik.
4. Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan serta seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember atas bekal ilmu dan kelancaran studi yang diberikan kepada penulis.

5. Ibuku tercinta, Ibu Sulastri, saudara-saudaraku tercinta, serta keluarga besar di Bondowoso dan Probolinggo yang selalu memberi motivasi dan ketulusan doa bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Istriku, Prihandini Arie Santy, atas semua ketabahan, pengertian, cinta dan kasih sayangnya bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
7. Anak-anak kesayangan papa, Najmi Fatihus Shidqi dan Najmah Naurah Kamiliya
8. Rekan sejawat Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2013, kelas Situbondo, atas segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi. Proses perkuliahan yang akan jadi memory indah dalam hidup penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberikan balasan terbaik-Nya atas semua ketulusan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini bisa menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya.

Situbondo, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
HALAMAN MOTTO.....	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
HALAMAN PEMBIMBINGAN	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RINGKASAN	
<i>SUMMARY</i>	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN.....	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan	8
2.1.2 Teori Perubahan Kelembagaan	12
2.2 Tinjauan hasil Penelitian Sebelumnya	13

2.3 Kerangka Konseptual	22
BAB 3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	24
3.2 Penentuan Informan	24
3.3 Metode Pengambilan Data	25
3.4 Disain Penelitian	26
3.5 Metode Analisis Data	27
3.6 Definisi Operasional	31
3.7 Limitasi Penelitian	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	33
4.1.1 Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Situbondo	35
4.1.2 Profil Pengairan Kabupaten Situbondo	37
4.2 Pola Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Situbondo	39
4.2.1 Kelembagaan GP3A/GHIPPA dalam Pengelolaan Air Irigasi	41
4.2.1.1 Lamdasan Pembentukan GHIPPA	42
4.2.1.2 Pemilihan Ketua dan Pengurus GHIPPA	47
4.2.1.3 Kas GHIPPA	48
4.2.1.4 Kewenangan GHIPPA	51
4.2.2 Pola Koordinasi Antara Lembaga Pengelola Air	56
4.3 Disain Kelembagaan GP3A/GHIPPA yang mandiri	59
4.3.1 Analisis SWOT	60
4.3.2 Strategi Pengembangan GP3A/GHIPPA yang Mandiri	67
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

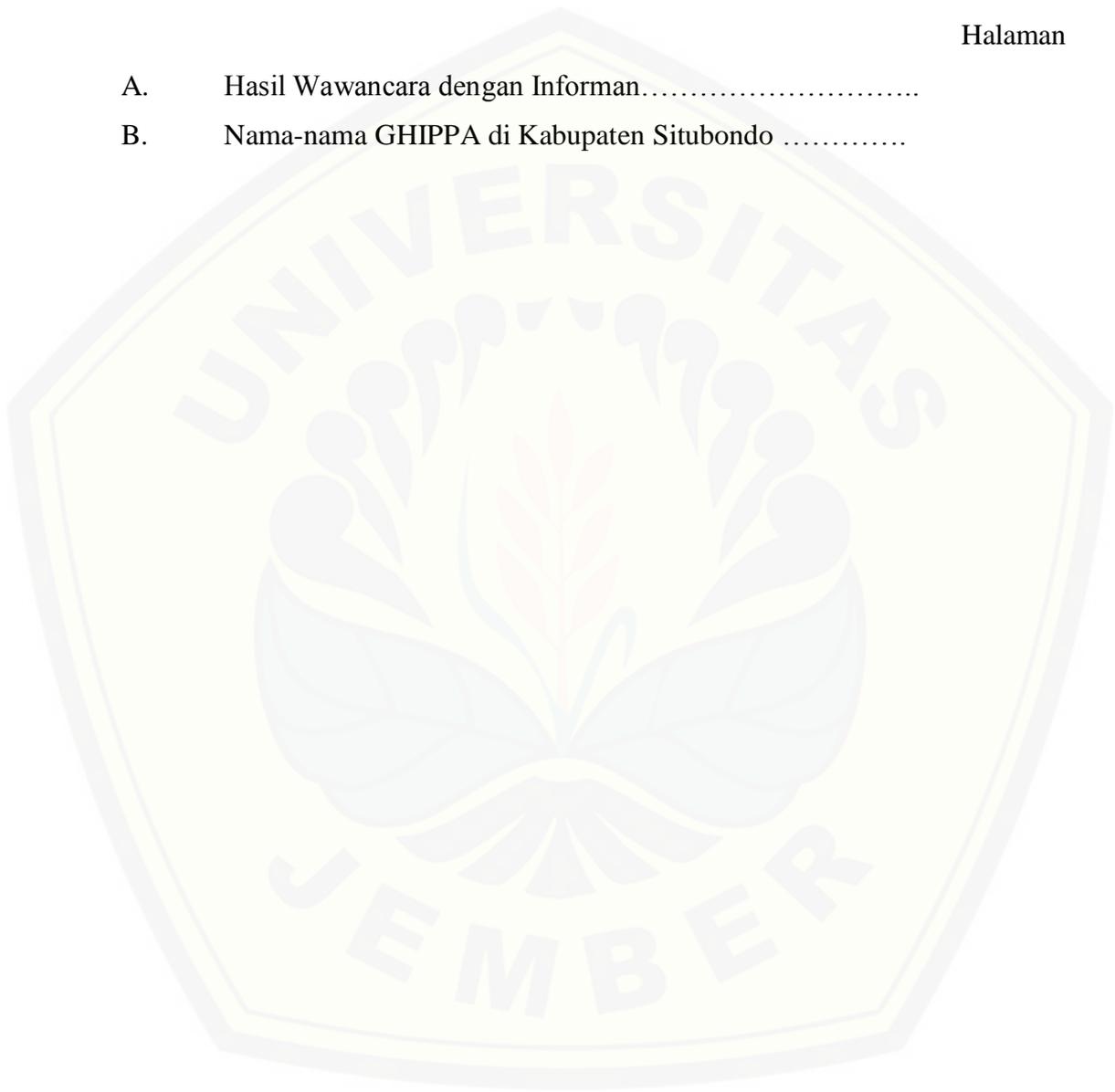
	Halaman
1.1 Jumlah GHIPPA dan Induk HIPPA di Kabupaten Situbondo	3
1.2 Inventarisasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2014	4
2.1 Penelitian Sebelumnya	18
4.1 Curah Hujan, Penguapan, Temperatur, dan Kelembaban di Kabupaten Situbondo Tahun 2013	35
4.2 Luas Baku Sawah per UPTD di Kabupaten Situbondo Tahun 2014	37
4.3 Lembaga Pengelola Air Beserta Wilayah Kewenangannya .	55
4.4 Matriks Faktor Internal dan Eksternal GHIPPA	63
4.5 Matriks Faktor-faktor Internal (IFAS)	64
4.6 Matriks Faktor-faktor Eksternal (EFAS)	65
4.7 Daftar Nilai Terboboti Untuk Nilai SWOT	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	23
3.1 Penentuan Informan	25
3.2 Disain Penelitian	27
3.3 Matriks Kuadran SWOT	30
4.1 Banyaknya Rata-rata Curah Hujan per Bulan Tahun 2013 ...	34
4.2 Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Palawija di Kabupaten Situbondo Tahun 2013	36
4.3 Panjang Saluran di Wilayah Kerja UPTD di Kabupaten Situbondo	38
4.4 Jumlah Induk HIPPA, GHIPPA dan HIPPA di saluran di Kabupaten Situbondo	39
4.5 Komponen Pembentuk Pengelola Air	41
4.6 Salah satu Saluran Primer di Kabupaten Situbondo	44
4.7 Jumlah GHIPPA yang Menerima Bantuan Pemerintah	46
4.8 Perbaikan Saluran Sekunder (Program WISMP)	47
4.9 Pemanfaatan Dana IPAIR (Sesuai AD/ART)	50
4.10 Tahapan Penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG)	53
4.11 Pola Koordinasi Lembaga Pengelola Air	57
4.12 Struktur Organisasi Komisis Irigasi	59
4.13 Proses Wawancara di Lapangan	60
4.14 Kuadran Analisis SWOT	66
4.15 Disain Kelembagaan GHIPPA yang Mandiri	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Hasil Wawancara dengan Informan.....	
B. Nama-nama GHIPPA di Kabupaten Situbondo	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi pertanian. Pada titik ini, ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan beras dan makanan pokok lainnya menjadi sangat penting. Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menjadi 275 juta jiwa pada tahun 2025, maka untuk memenuhi produksi bahan makanan pokok berupa padi, sangat diperlukan jaringan irigasi (Salim, 2005). Keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan air sebagai salah satu faktor input yang mendukung proses produksi pertanian. Irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras.

Pemerintah melalui Undang-undang dan Peraturan Pemerintah memiliki sebuah aturan terkait kebijakan pengelolaan irigasi. Rujukan kebijakan pengelolaan air yang diamanatkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang irigasi antara lain diarahkan untuk memperbaiki kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) merupakan salah satu upaya untuk mendorong pengelolaan sistem irigasi yang handal dan mandiri. Kebijakan pelaksanaan PPSIP diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Dalam hal ini, peran partisipatif masyarakat pemakai air menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan PPSIP (Dirjen SDA).

Upaya penerapan PPSIP diwujudkan dengan pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). P3A atau HIPPA merupakan kelembagaan lokal pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis dan berbadan hukum. Melalui Inpres no 3 Tahun

1999, Pemerintah membuat kebijakan terkait pembaharuan pengelolaan irigasi dengan menyerahkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A sebagai upaya pemberdayaan P3A dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) dan keberlanjutan irigasi. Pada aras ini, kemandirian P3A baik secara ekonomi maupun sosial menjadi landasan fundamental demi mewujudkan peran P3A dalam pelaksanaan PPSIP.

Rujukan Peraturan No.32/PRT/M/2007 menjelaskan tentang peran P3A dalam saluran irigasi petak tersier, sedangkan saluran irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Gabungan P3A (GP3A). Pada sisi lain, gabungan beberapa lembaga GP3A berperan dalam pengelolaan air pada saluran irigasi blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi. Ketiga lembaga tersebut memiliki wilayah pemanfaatan air tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lopa dan Maricar (2013) mengatakan bahwa penggabungan P3A dan pelibatan petani anggota P3A merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran partisipatif dan efisiensi pengelolaan irigasi ditingkat lokal. Menurut Prasetijo (tanpa tahun), strategi yang dapat digunakan untuk pemberdayaan HIPPA / P3A melalui pembentukan HIPPA yang berbadan hukum. HIPPA yang berbadan hukum diharapkan memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dan program terencana yang terangkum dalam AD/ART HIPPA. AD/ART HIPPA merupakan pedoman dasar bagi HIPPA dalam melakukan program-program dalam pengelolaan irigasi.

Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator dan motivator harus mampu bekerjasama dalam pengelolaan sumberdaya air dan memberikan sarana produksi dan menjadi fasilitas dalam pembentukan koperasi serba usaha. Dengan kata lain, kemandirian P3A atau HIPPA menjadi sangat penting untuk menjaga pengelolaan sumberdaya air yang efisien.

Disisi lain, keberadaan norma lokal dan tradisi setempat dalam pengaturan air yang sebelumnya dilakukan oleh *ulu-ulu* air menjadi elemen dasar yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Kultur yang telah mengakar dalam masyarakat

menjadi model kelembagaan yang kuat dan dipatuhi oleh masyarakat karena berasal dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, disain kelembagaan HIPPA yang mandiri haruslah tetap mempertahankan elemen dasar tersebut agar kemandirian HIPPA tidak meninggalkan kultur dan budaya dari masyarakat setempat untuk menjamin kelembagaan yang *sustainable*.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah 163.850 Ha dimana 18.53% penggunaan lahannya sebagai areal perawahan. Disisi lain, sumbangan sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 29.42% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Situbondo setelah sektor perdagangan, hotel dan restaurant (BPS, 2015). Keberhasilan sektor pertanian harus didukung oleh pengelolaan air irigasi yang efisien dan sesuai kebutuhan produksi. Pada sisi ini, peran dan partisipatif dari lembaga pengelola air irigasi seperti P3A/HIPPA dan GP3A/GHIPPA merupakan kunci dalam keberhasilan pengelolaan air irigasi. Berikut akan disajikan Tabel 1.1 terkait Jumlah GHIPPA dan Induk HIPPA di Kabupaten Situbondo.

Tabel 1.1 Jumlah GHIPPA dan Induk HIPPA di Kabupaten Situbondo

No	UPTD	Jumlah Lembaga		Baku Sawah (Ha)
		GHIPPA	Induk HIPPA	
1	Besuki	8	-	1,629
2	Suboh	2	-	2,611
3	Situbondo	11	2	4,036
4	Panji	9	1	3,266
5	Arjasa	4	-	4,021
6	Asembagus	8	-	4,063
	Total	42	3	19,626

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015

Rujukan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 42 GHIPPA yang merupakan gabungan dari beberapa HIPPA dengan wilayah pengelolaan irigasi yaitu saluran sekunder. Sedangkan induk HIPPA merupakan gabungan dari

beberapa GHIPPA dengan wilayah pengelolaan yaitu saluran primer. Jumlah induk HIPPA di Kabupaten Situbondo sebanyak 3 induk HIPPA. Dapat terlihat pada Tabel 1.1 bahwa induk HIPPA hanya terdapat di beberapa wilayah, yaitu di wilayah kecamatan kota saja.

Perbedaan wilayah kerja antara GHIPPA dan induk HIPPA didasarkan pada hamparan hidrologis bukan pada wilayah administratif. Berikut akan disajikan Tabel 1.2 tentang Inventarisasi Jaringan Ber-irigasi di Kabupaten Situbondo tahun 2014:

Tabel 1.2 Inventarisasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Situbondo tahun 2014

No	UPTD	Panjang Saluran (m)		
		Saluran Induk (Sal. I)	Saluran Sekunder (Sal. II)	Saluran Tersier (Sal. III)
1	Besuki	85	120.298	181.28
2	Suboh	20.126	37.430	-
3	Situbondo	15.939	1.400	-
4	Panji	-	534	67.450
5	Arjasa	28.163	29.113	-
6	Asembagus	15.438	45.354	-
	Total	79.751	234.129	248.734

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, panjang saluran induk adalah 79.751 meter, saluran sekunder adalah 234.129 meter dan saluran tersier adalah 248.734 meter. Panjangnya saluran menentukan wilayah kerja HIPPA, GHIPPA dan induk HIPPA. Dalam hal ini, koordinasi antara lembaga lokal pengelola air irigasi merupakan pondasi yang harus dibangun untuk dapat mewujudkan pengelolaan air irigasi yang mandiri.

Rachman (1999) mengungkapkan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pendistribusian air secara adil dan merata adalah (1) Jumlah kebutuhan air bertambah tanpa kontrol, (2) Terdapat beberapa petakan sawah relatif dari saluran air yang tidak diperhitungkan kebutuhannya, (3) Tidak adanya sanksi bagi pelaku penyadapan air irigasi secara liar dengan menggunakan pompa, (4) Pintu-pintu air irigasi yang mulai rusak dan tidak berfungsi baik, dan (5) produktivitas padi sangat beragam antara bagian hulu dan hilir. Preposisi ini

menunjukkan perlunya pemberdayaan P3A/HIPPA sebagai lembaga lokal yang mampu berperan penting dalam pengelolaan sumberdaya air yang efisien. Pemberdayaan HIPPA bertujuan untuk mengelola sumberdaya air yang ada dengan adil dan merata sesuai kebutuhan petani di wilayahnya dan meningkatkan peran petani dalam pemeliharaan saluran irigasi yang ada.

Pengelolaan jaringan irigasi yang baik memerlukan keterpaduan yang menyeluruh antara investasi jangka pendek untuk kegiatan operasional dan pengelolaan (OP) dan investasi jangka panjang untuk kegiatan rehabilitasi dari sistem irigasi. Keterbatasan pembiayaan dari pemerintah, ditangani dengan adanya iuran pengelolaan air (IPAIR) yang berdasarkan Inpres No. 3 tahun 1999 sepenuhnya dikelola oleh P3A/HIPPA. IPAIR merupakan salah satu solusi untuk mencapai pemulihan biaya OP secara penuh yang mandiri dari petani anggota P3A/HIPPA.

Pemaparan diatas memberikan sebuah gambaran tentang kemandirian HIPPA dalam pengelolaan irigasi merupakan sebuah hal yang mutlak dilakukan sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Inpres No.3 Tahun 1999. Kebijakan tersebut telah membawa dampak baru bagi peran dan kewenangan HIPPA yang menjadi semakin besar. Pemberdayaan HIPPA dilakukan dengan meningkatkan partisipasi HIPPA sebagai wadah berkumpulnya petani pemakai air, dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan irigasi. Namun disisi lain, keterbatasan pembiayaan dan dana yang dimiliki HIPPA menjadi kendala tersendiri bagi HIPPA ataupun GHIPPA untuk dapat menjadi lembaga yang mandiri.

Pada titik ini, dibutuhkan sebuah disain kelembagaan HIPPA dan GHIPPA yang saling mendukung dan menguatkan dalam pengelolaan air baik di saluran tersier ataupun di saluran sekunder. HIPPA yang mandiri secara langsung akan memengaruhi keberadaan GHIPPA yang mandiri pula karena GHIPPA merupakan kumpulan dari beberapa HIPPA.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan sumberdaya air yang efisien dan efektif merupakan salah satu upaya penyediaan air yang cukup untuk menjamin keberlangsungan usaha petani. Dalam hal ini, menimbulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi tema penelitian yaitu :

1. Bagaimana pola kelembagaan ekonomi antara GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA di Kabupaten Situbondo dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air?
2. Bagaimana disain kelembagaan GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab pertanyaan empiris dan teoritis melalui penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pola kelembagaan ekonomi antara GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA di Kabupaten Situbondo dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air.
2. Menganalisis disain kelembagaan GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan penelitian yang dipaparkan diatas maka diharapkan penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pola kelembagaan ekonomi GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan

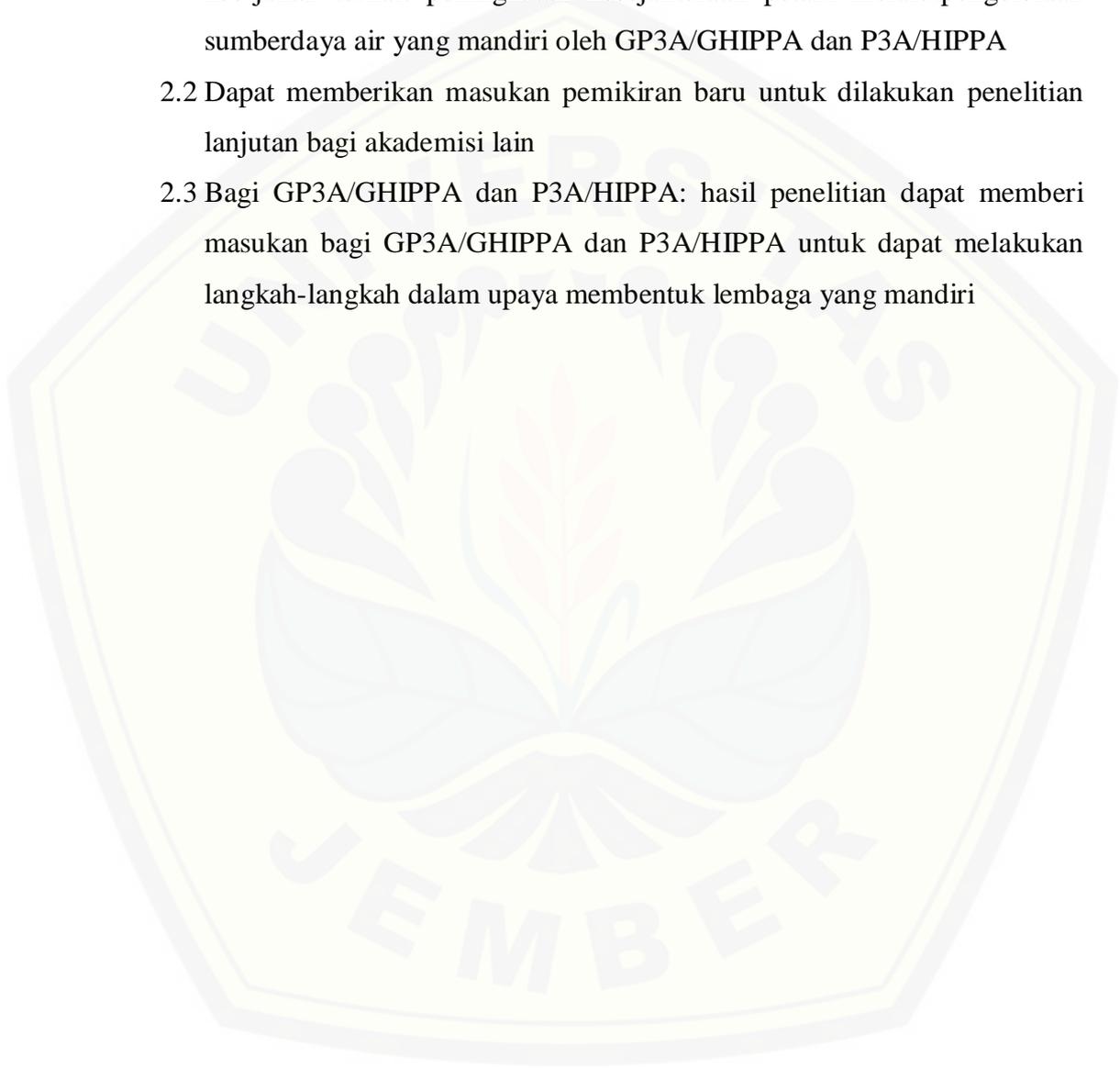
pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo

2. Kontribusi Praktis

2.1 Bagi pemerintah : hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam membuat kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumberdaya air yang mandiri oleh GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA

2.2 Dapat memberikan masukan pemikiran baru untuk dilakukan penelitian lanjutan bagi akademisi lain

2.3 Bagi GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA: hasil penelitian dapat memberi masukan bagi GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam upaya membentuk lembaga yang mandiri



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 akan diuraikan mengenai *grand theory* yang menjadi landasan pembahasan tema dan fokus dalam penelitian. Tema penelitian mengambil dasar pada ilmu ekonomi kelembagaan tentang teori kelembagaan yang terjadi dalam hubungan antar lembaga HIPPA yang tergabung dalam GHIPPA terkait pengelolaan air irigasi.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan

Dalam ilmu ekonomi, terdapat sebuah aliran ilmu ekonomi baru yaitu ilmu ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi pada ilmu ekonomi neoklasik dimana ilmu ekonomi klasik. Secara garis besarnya, teori ekonomi kelembagaan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi kelembagaan lama (*Old Institutional Economics*) dan ilmu kelembagaan baru (*New Institutional Economics*). Thorstein Veblen dan John R. Commons merupakan tokoh yang memelopori lahirnya ilmu Ekonomi kelembagaan lama (OIE). Ilmu OIE memiliki fokus kajian pada kebiasaan (*habits*) yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Menurut (Nabli & Nugent, 1989), Ekonomi Kelembagaan Lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh Ekonomi Kelembagaan Lama mengkritik keras aliran neoklasik karena:

1. Ilmu ekonomi neoklasik tidak menganggap institusi sebagai bagian dari penggerak ekonomi sehingga mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala-kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*).
2. Memfokuskan pada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behaviour of individuals*).
3. Kesetimbangan (*equilibrium*) yang bersifat statis menjadi konsentrasi dari ilmu ekonomi neoklasik.

4. Ilmu ekonomi neoklasik menganggap bahwa preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan sehingga patut diabaikan.

Pada sisi yang lain, NIE mengambil arah fokus pada proses perubahan kelembagaan dan pentingnya kelembagaan sebagai kerangka individu dalam berinteraksi serta kendala yang menghalanginya (Hodgson, 1998:180-181; Williamson, 1998:75 dalam Yustika, 2012). Ekonomi Kelembagaan Baru menekankan pentingnya institusi. Namun dalam hal ini, bukan berarti landasan analisis ekonomi neoklasik menjadi diabaikan. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh Ekonomi Kelembagaan Baru (Nabli & Nugent, 1989).

Menurut Commons (1931) dalam Yustika (2012), kelembagaan merupakan hak-hak dasar yang bersifat alamiah (*natural rights*) yang menjadi kerangka hukum dalam mengatur tindakan individu, yang saling berinteraksi dalam sebuah 'perilaku ekonomi' (*economic behavior*), membandingkan hal-hal yang dinamis dengan statis, proses dengan komoditas, kegiatan dengan perasaan, tindakan kolektif dengan tindakan individu, manajemen dengan keseimbangan dan pengawasan dengan kebebasan (*laissez faire*). Senada dengan pernyataan tersebut, Bardhan (1989) dan Manig (1991), kelembagaan didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan, norma-norma sosial, serta unsur-unsur lain pada sebuah struktur kerangka kerja interaksi sosial, yang menggambarkan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi kelembagaan lahir dari sebuah proses yang terjadi secara terus menerus dan bukan merupakan sebuah landasan yang telah direncanakan melainkan merupakan sebuah proses yang terjadi sebagai respon adanya perubahan tujuan ekonomi (Brousseau dan Glachant; 2007). Ekonomi kelembagaan baru telah memosisikan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutions*) dengan mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya sebagai solusi dalam mengatasi

kegagalan pasar (*market failure*). Dalam NIE, adanya informasi yang tidak sempurna (*imperfect information*), *eksternalitas* dan fenomena *free-riders* yang terjadi pada barang-barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar, sehingga kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan.

Pada teori ekonomi neoklasik, NIE menerima asumsi dasar tentang kelangkaan (*scarcity*) dan kompetisi (*competition*) dengan mengabaikan asumsi rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Dalam ilmu ekonomi kelembagaan baru (NIE) upaya untuk mencapai efisiensi dilakukan melalui penggunaan sumberdaya. Dalam pendekatan NIE, kegagalan pasar (*market failure*) disebabkan oleh informasi yang tidak sempurna (*imperfect information*), *eksternalitas* produksi dan barang-barang publik. NIE mengembangkan teori neoklasik dengan memasukkan peran biaya transaksi dan juga peran kelembagaan dalam rintangan untuk mencapai kinerja ekonomi (North, 1994; Williamson, 1985 dalam Vatn, 2006; Yustika, 2012).

Secara umum, ilmu ekonomi kelembagaan baru (NIE) memiliki dua tingkatan yaitu pada level makro terdapat lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) sedangkan pada level mikro terdapat kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangement*). *Institutional environment* berada pada tataran tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak. Berbeda dengan *institutional arrangement* yang beroperasi pada level analisis mikro yang fokus pada masalah tata kelola kelembagaan (*institutional of governance*). *Institutional arrangement* merupakan kesepakatan dari unit-unit ekonomi dalam mengelola dan menemukan solusi agar sebuah hubungan ekonomi antar unit berlangsung dengan baik (Yustika, 2012: 36).

NIE merupakan pengembangan dari ekonomi neoklasik yang memasukkan peran biaya transaksi dalam pertukaran dan juga meletakkan kelembagaan sebagai rintangan kritis untuk memperoleh kinerja ekonomi (Harris *et al* (1995:3)). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa NIE meletakkan dasar pemikirannya pada konsep informasi yang cenderung tidak sempurna dan masing-masing individu memiliki ide yang berbeda-beda. Sehingga secara kokoh NIE meletakkan biaya untuk mencari

harga yang relevan, negosiasi dan menyepakati kontrak serta kemudian mengawasi dan memaksakannya sebagai bagian fundamental terbentuknya norma dan aturan dalam pencapaian tujuan ekonomi.

North (1990) memilah kelembagaan berdasarkan atas bentuknya (tertulis/tidak tertulis) yaitu: informal dan formal. Kelembagaan informal dimaknai sebagai kelembagaan yang norma dan ajarannya menjadi tradisi dan sudah melekat di masyarakat dan pada umumnya norma dan ajarannya tidak tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan merupakan kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah segala bentuk aturan dan norma yang tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kelembagaan formal meliputi semua kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun lokal. Acapkali kelembagaan informal bertransformasi menjadi kelembagaan formal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Perubahan tersebut dimaknai sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Masyarakat tradisional dengan kehidupannya yang serba sederhana dengan potensi konflik yang sangat minim tentu tidak membutuhkan peraturan tertulis yang rinci yang berbeda dengan masyarakat modern dengan segala kompleksitas kehidupannya.

Sedangkan Kasper dan Streit (1998) mengelompokkan kelembagaan sesuai dengan proses terjadinya yaitu *internal institutions* dan *external institutions*. *Internal institution* merupakan lembaga/institusi yang berasal dari *culture* masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi landasan hidup masyarakat. Institusi eksternal adalah lembaga/institusi yang keberadaannya dibuat oleh pihak luar/ketiga dimana pemberlakuan lembaga/institusi tersebut dilakukan dengan cara dipaksakan pada suatu komunitas tertentu. Kebijakan/regulasi produk yang dibuat pemerintah termasuk *external institutions*.

2.1.2 Teori Perubahan Kelembagaan

Perubahan kelembagaan merupakan sebuah proses transformasi yang bersifat terus menerus dan permanen yang menjadi bagian dari pembangunan. Perubahan kelembagaan yang terjadi didalam sebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah perubahan yang terdapat dalam pola-pola dan sistem-sistem interaksi, aturan organisasi dan norma perilaku yang terdapat pada masyarakat. Implikasi dari terjadinya perubahan kelembagaan mendorong pada terjadinya perubahan kondisi-kondisi sebagai bentuk penyesuaian terhadap faktor-faktor eksternal yang menjadi pemicu/umpan terjadinya perubahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan kelembagaan akibat adanya pemicu/umpan baik yang terjadi secara alamiah ataupun dipaksakan.

Umpan/pemicu yang kerap mendorong terjadinya perubahan kelembagaan adalah adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan direspon oleh masyarakat sebagai bentuk timbal balik yang dapat terjadi secara spontan sebagai upaya pemecahan masalah yang terjadi. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya penyesuaian dari adanya perubahan kepentingan ekonomi yang terjadi yang terjadi secara spontan sebagai dampak dari interaksi-interaksi ekonomi yang terjadi. Vant (2006) dan Yustika (2012) menyebut perubahan tersebut sebagai perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan kepentingan dari pelaku ekonomi. Perubahan kelembagaan merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus (transformasi permanen) sebagai akibat dari adanya aspek-aspek sosial yang terus berkembang sebagai bentuk penyesuaian/respon dari berubahnya bidang-bidang lain seperti ekonomi, budaya, politik, hukum dan lainnya. menjelaskan bahwa pada sisi lain, perubahan Perubahan kelembagaan dapat terjadi dengan adanya rekayasa sosial (*social engeneering*) yang mendorong terjadinya pola interaksi ekonomi antar pelakunya. Dengan kata lain, perubahan kelembagaan merupakan perubahan aturan main (*rules of the game*) akibat perubahan kepentingan dari pelaku ekonomi (Yustika, 2012).

Dengan kata lain, perubahan kelembagaan diartikan sebagai perubahan yang timbul dengan adanya masalah kelangkaan (*scarcity*) dan perilaku individu yang sulit ditebak (*unpredictable*). Adanya kelangkaan dapat disebabkan oleh keterbatasan pada sumberdaya ekonomi ataupun oleh keterbatasan aturan main (*rules of the game*). Perubahan ini yang terjadi tidak selalu mendorong terciptanya sebuah kelembagaan yang efisien. Adanya hambatan dan rintangan, baik secara formal atau informal dapat menghambat terjadinya perubahan kelembagaan yang efisien (North, 1990; Hira&Hira, 2000).

Yustika (2012) menjelaskan proses terjadinya perubahan kelembagaan dapat dikelompokkan dalam dua proses, proses pertama dilakukan secara sukarela dan proses kedua dipaksakan oleh lembaga yang lebih kuat. Proses perubahan kelembagaan secara sukarela/alamiah biasanya didasari oleh kesepakatan kelompok/individu untuk membuat kesepakatan baru yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini adanya perubahan tujuan ekonomi yang terjadi secara alamiah telah mendorong terjadinya kesepakatan baru. Disisi lain, proses perubahan kelembagaan yang terjadi sebagai akibat adanya campur tangan dari pemerintah. Campur tangan pemerintah diimplementasikan dengan adanya kebijakan atau peraturan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur interaksi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berusaha mengubah tujuan ekonomi sebagai mana perubahan tujuan yang sama dengan proses pertama (Yustika, 2012).

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

HIPPA atau P3A merupakan lembaga lokal yang berperan dalam pengelolaan irigasi dan merupakan lembaga yang menjadi wadah bagi petani untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan dinamika kelembagaan HIPPA/P3A banyak dilakukan.

Pengelolaan pengairan bagi usaha pertanian merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan usaha pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh

Mustaniroh, 2001 bahwa untuk tujuan optimasi sistem produksi padi, pengembang proyek harus mengontrol sistem irigasi, sehingga dapat merehabilitasi sarana irigasi dan drainase. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi di tingkat petani agar mencapai hasil produksi usahatani padi yang optimal maka dari aspek kelembagaan lebih ditingkatkan koordinasi dan partisipasi petani dalam P3A sehingga kesadaran untuk pemeliharaan jaringan irigasi meningkat serta komunikasi antara petani dan penyuluh pertanian ditingkatkan sehingga pemanfaatan irigasi akan sejalan dengan peningkatan produksi usahatani padi.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti *et al*, 2011 yang menganalisa tentang implementasi kebijakan pemerintah yaitu PP No.20 Tahun 2006 terkait pengelolaan irigasi telah membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi serta pendanaan terhadap kegiatan OP jaringan irigasi. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis jaringan dan sosiokultur yang beragam, maka perlu adanya pedoman penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerahnya. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat terwujud pelaksanaan OP jaringan irigasi yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan P3A/P3A Gabungan. Senada dengan penelitian tersebut, Lopa dan Maricar, 2013 dalam penelitiannya menerangkan bahwa implikasi kebijaksanaan dibidang kelembagaan irigasi disimpulkan sebagai berikut : 1) Penggabungan P3A dan pelibatan petani anggota P3A dalam pengelolaan sumber daya air sampai pada distribusi air ditingkat atas (saluran primer dan sekunder) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi di tingkat lokal. Penggabungan P3A seyogyanya didasarkan pada wilayah hidrologi (bukan pendekatan administratif), sehingga potensi konflik dalam pengelolaan irigasi relatif dapat dihindari. 2) Penyerahan urusan pemungutan dan pengelolaan dana IPAIR yang otonom, dapat mendorong partisipasi petani dalam membayar iuran. 3) Tarif IPAIR tidak dapat diberlakukan secara umum karena tingkat pelayanan aparat pengairan tergantung

pada kebutuhan petani danketersediaan air. 4) Diperlukan adanya pedoman yang jelas dan partisipatif serta berwawasanlingkungan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat setempat melalui pemberdayaaninstitusi “Community Management” seperti P3A.

Namun demikian, peran lembaga HIPPA/P3A dalam pengelolaan air belum dirasakan maksimal oleh petani secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lemahnya peran partisipatif HIPPA/P3A dalam pengelolaan air. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kurangnya koordinasi HIPPA dengan lembaga lain seperti GHIPPA ataupun instansi terkait. Lemahnya koordinasi berimplikasi pada pengaturan penggunaan air yang tidak sesuai dengan harapan anggota. Disisi lain, masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, seperti pembobolan saluran, perusakan saluran tersier ataupun pengaturan air dengan membuka pintu air secara bebas, dan pelanggaran AD/ART (seperti, keengganan membayar iuran) menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja HIPPA/P3A (Saadah, 2012; Sitompul, 2012; Listyawati, 2011).

Pembentukan organisasi HIPPA Gabungan/Federasi berdasarkan hampan hidrologis merupakan langkah strategis dalam upaya memberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan OP irigasi. Keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung kepada kinerja lembaga pengelola air ditingkat distribusi dan alokasi.Partisipasi petani dalam pengelolaan sumberdaya air perlu ditingkatkan, tidak hanya padapengelolaan di tingkat usahatani, namun sampai kepada distribusi dan transportasi ditingkat atas.Dengan demikian, kelembagaan yang perlu mendapat perhatian seksama adalah Panitia Irigasi Tk.I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA),dan unit Pengelola Sumber Air serta HIPPA(Rachman dan Kariyasa, 2002; Rachman, 2009).Menurut Syamsir (2011), Pengembangan organisasi harus terfokus pada pembentukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Pada aras ini, lingkungan eksternal organisasi HIPPA dapat mempengaruhi perubahan

organisasi karena lingkungan eksternal dapat mempengaruhi efektifitas dan struktur organisasi.

Dalam penelitian yang lain, Arifet *al* (2006) memaparkan bahwa pelaksanaan O&P dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kondisi pasar, perubahan iklim, keragaman budaya/kearifan lokal serta dinamika masyarakat. Peningkatan komitmen dalam pelaksanaan O&P dari anggota HIPPA atau GHIPPA dengan instansi terkait merupakan hal yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul sehingga upaya penyelesaian dapat dilakukan dialog. Salah satu kendala dalam pelaksanaan O&P adalah minimnya dana (Listyawati, 2011) Sehingga perlu diterapkan iuran irigasi yang formulasi besarnya berbasis pada nilai ekonomi air irigasi dan kuantitas air irigasi yang digunakan (Sumaryanto, 2006). Sedangkan Darma dan Fudjadja (2011) memaparkan bahwa penetapan iuran berdasarkan program kerja kelompok, pemberian insentif terhadap pengelolaan IPAIR dan pembayaran sistem tunai di rumah anggota HIPPA. Pengelolaan IPAIR sering menimbulkan konflik tersendiri. Untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek antara lain : transparansi, akuntabilitas, hak atas air dan aturan representasi (Rachman, 2009).

Listyawati (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab konflik dalam pengelolaan air irigasi adalah belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian izin hak guna usaha air, belum ada koordinasi yang baik antar instansi baik secara vertical maupun horizontal serta antara instansi dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, petani dan petambak belum memiliki *sense of belonging* terhadap saluran irigasi dan belum adanya kesadaran dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) saluran, pendanaan OP yang kurang memadai dan SDM pada instansi yang berwenang kurang baik kualitas dan kuantitasnya. Senada dengan hal tersebut, Rachman (2009) menyatakan bahwa untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek antara lain : transparansi, akuntabilitas, hak atas air dan aturan representasi. Dalam penelitian yang lain, Saadah dan

Mahyuddin (2012) menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan pengairan tidak berfungsi karena belum terjadi koordinasi antar HIPPA dan GHIPPA, pengaturan penggunaan air tidak sesuai harapan anggota, dan duplikasi pembinaan HIPPA antara Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian, tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran membuat *balombong*, mematikan saluran tersier belum ada, karena Perda tentang pengairan tidak mengatur sanksi-sanksi.

Darma *et al*, 2011 mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan air adalah kekuatan kelembagaan yang ditunjukkan dengan keaktifan pengurus, kemampuan pengurus mengelola IPAIR, keterbukaan pengurus, keberadaan program kerja, insentif pengurus dalam penagihan IPAIR, dan keaktifan anggota HIPPA. Pengelolaan IPAIR dan iuran HIPPA secara efektif dapat dilakukan dengan penetapan besarnya iuran HIPPA dan IPAIR berdasarkan program kerja kelompok, pemberian insentif terhadap pengelola IPAIR, pembayaran system tunai di rumah anggota HIPPA, dan meningkatkan komunikasi dan pengumuman kegiatan kelompok melalui mesjid, sanggar tani dan kantor desa.

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Uraian
1	Rachman dan Kariyasa, 2002.	Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi	Partisipasi petani dalam pengelolaan sumberdaya air perlu ditingkatkan, tidak hanya pada pengelolaan di tingkat usahatani, namun sampai kepada distribusi dan transportasi ditingkat atas. Pembentukan organisasi HIPPA Gabungan/Federasi berdasarkan hampanan hidrologis merupakan langkah strategis dalam upaya 18 kewenangan lebih luas dalam pengelolaan OP irigasi. Selain upaya penyesuaian kelembagaan di tingkat petani, keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung kepada kinerja lembaga pengelola air ditingkat distribusi dan alokasi. Dengan demikian, kelembagaan yang perlu mendapat perhatian seksama adalah Panitia Irigasi Tk.I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), dan unit Pengelola Sumber Air serta HIPPA.
2	Arif, <i>et al</i> , 2006	Pengembangan Konsep Sistem Operasi Dan Pemeliharaan (O & P) Daerah Irigasi Multiguna Dengan Membangun Komitmen Untuk Berbuat Konsensus Antar Pelaku : Sebuah Kasus Di Jawa Timur	Pelaksanaan O&P dipengaruhi pasar, iklim, keragaman budaya dan dinamika masyarakat, adanya pemahaman bersama bahwa permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan dialog dan perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan komitmen bersama dalam pelaksanaan O&P
3	Lopa dan Maricar, 2013. <i>Konferensi Nasional Teknik Sipil</i>	Kajian Proses Penguatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Yang Berwawasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijaksanaan dibidang kelembagaan irigasi disimpulkan sebagai berikut : 1)Penggabungan P3A dan pelibatan petani anggota P3A dalam

	7 (KoNTekS 7) <i>Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 201</i>	Lingkungan	pengelolaan sumber daya air sampai padadistribusi air ditingkat atas (saluranprimer dan sekunder) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efesiensi pemanfaatan air irigasi di tingkat lokal. Penggabungan P3A seyogyanya didasarkan pada wilayah hidrologi (bukanpendekatan administratif), sehingga potensi konflik dalam pengelolaan irigasi relatif dapatdihindari.2) Penyerahan urusan pemungutan dan pengelolaan dana IPAIR yang otonom,dapatmendorong partisipasi petani dalam membayar iuran. 3) Tarif IPAIR tidak dapat diberlakukansecara umum karena tingkat pelayanan aparat pengairan tergantung pada kebutuhan petani danketersediaan air. 4) Diperlukan adanya pedoman yang jelas dan partisipatif serta berwawasanlingkungan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat setempat melalui pemberdayaaninstitusi “Community Management” seperti P3A
4	Mustaniroh, 2001. <i>Jurnal Teknologi Pertanian, Vol. 2, No. 2, Agustus 2001 : 14-21</i>	Evaluasi Aspek Kelembagaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Petani Pada Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan	Dari hasil analisa didapatkanbahwa kondisi di areal penelitian tidak sepenuhnya baik tetapi mencukupi untuk meningkatkan penggunaan air. Untuk tujuan optimasi sistem produksi padi, pengembang proyek harus mengontrol sistem irigasi, sehingga dapat merehabilitasi sarana irigasi dan drainase. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi di tingkat petani agar mencapai hasil produksi usahatani padi yang optimal maka dari aspek kelembagaan lebih ditingkatkan koordinasi dan partisipasi petani dalam P3A sehingga kesadaran untuk pemeliharaan jaringan irigasi meningkat serta komunikasi antara petani dan penyuluh pertanian ditingkatkan sehingga pemanfaatan irigasi akan sejalan dengan peningkatan produksi usahatani padi.
5	Rachman, 2009. <i>Analisis Kebijakan</i>	Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi :	Pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui

	<i>Pertanian, Vol. 7 No.1 Maret 2009: 1-9</i>	Kasus Provinsi Banten	pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek antara lain : transparansi, akuntabilitas, hak atas air dan aturan representasi.
6	Listyawati, 2011.	Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman	Faktor-faktor penyebab konflik adalah : belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian izin hak guna usaha air, belum ada koordinasi yang baik antar instansi baik secara vertical maupun horizontal serta antara instansi dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, Petani dan Petambak belum memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap saluran irigasi dan belum adanya kesadaran dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) saluran, pendanaan OP yang kurang memadai dan SDM pada instansi yang berwenang kurang baik kualitas dan kuantitasnya
7	Damayanti, Hartono, Hardyastuti dan Darwanto. 2011. <i>J. Agroland 18 (1) : 50 - 56, April 2011</i>	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Dan Pengelolaan Irigasi.	Implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan irigasi membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi serta pendanaan terhadap kegiatan OP jaringan irigasi. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis jaringan dan sosiokultur yang beragam, maka perlu adanya pedoman penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerahnya. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat terwujud pelaksanaan OP jaringan irigasi yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan P3A/P3A Gabungan.
8	Darma, dan Fudjaja, 2011. <i>Jurnal Agribisnis, Juni 2011, Vol. 7 No. 1</i>	Penguatan HIPPA Untuk Pengelolaan IPAIR Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Di Kabupaten	Faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan air adalah kekuatan kelembagaan yang ditunjukkan dengan keaktifan pengurus, kemampuan pengurus mengelola IPAIR, keterbukaan pengurus, keberadaan program kerja, insentif pengurus dalam penagihan IPAIR, dan keaktifan anggota

		Pinrang	HIPPA. Pengelolaan IPAIR dan iuran HIPPA secara efektif dapat dilakukan dengan penetapan besarnya iuran HIPPA dan IPAIR berdasarkan program kerja kelompok, pemberian insentif terhadap pengelola IPAIR, pembayaran system tunai di rumah anggota HIPPA, dan meningkatkan komunikasi dan pengumuman kegiatan kelompok melalui mesjid, sanggar tani dan kantor desa.
9	Saadah dan Mahyuddin, 2012	Unsur-unsur Pembangunan Dalam Pengelolaan Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumberdaya pengairan tidak efisien karena terjadi pendangkalan pada saluran sekunder, pintu air diatur secara bebas oleh petani, beberapa saluran tersier rusak atau dimatikan oleh petani, banyak petani yang membuat saluran pintas, kurang tenaga pengatur pintu air, belum ada sanksi yang diberlakukan bagi petani yang membuat saluran pintas dan mematikan saluran tersier. 2. Mekanisme pengelolaan pengairan tidak berfungsi karena belum terjadi koordinasi antar HIPPA dan GHIPPA, pengaturan penggunaan air tidak sesuai harapan anggota, dan duplikasi pembinaan HIPPA antara Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran membuat <i>balombong</i>, mematikan saluran tersier belum ada, karena Perda tentang pengairan tidak mengatur sanksi-sanksi
10	Prasetijo, tanpa tahun	Studi Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Desa	Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan HIPPA diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut : organisasi HIPPA harus berbentuk badan hukum, pemerintah sebagai fasilitator, motivator, mengadakan kerja sama pengelolaan, menyediakan tenaga pendamping, menyediakan sarana produksi dan memfasilitasi pembentukan koperasi serba usaha

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2015

2.3 Kerangka Konseptual

Salah satu faktor yang dapat menjadi kendala dalam keberhasilan usaha pertanian adalah ketersediaan air yang tidak sesuai kebutuhan petani. Dalam kondisi kebutuhan air yang semakin meningkat untuk berbagai kepentingan, sedangkan sumberdaya air yang tetap dan terbatas menyebabkan terjadinya kelangkaan (*scarcity*). Kelangkaan air dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial diantara pemakai air, seperti petani. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan air yang efisien, adil dan merata.

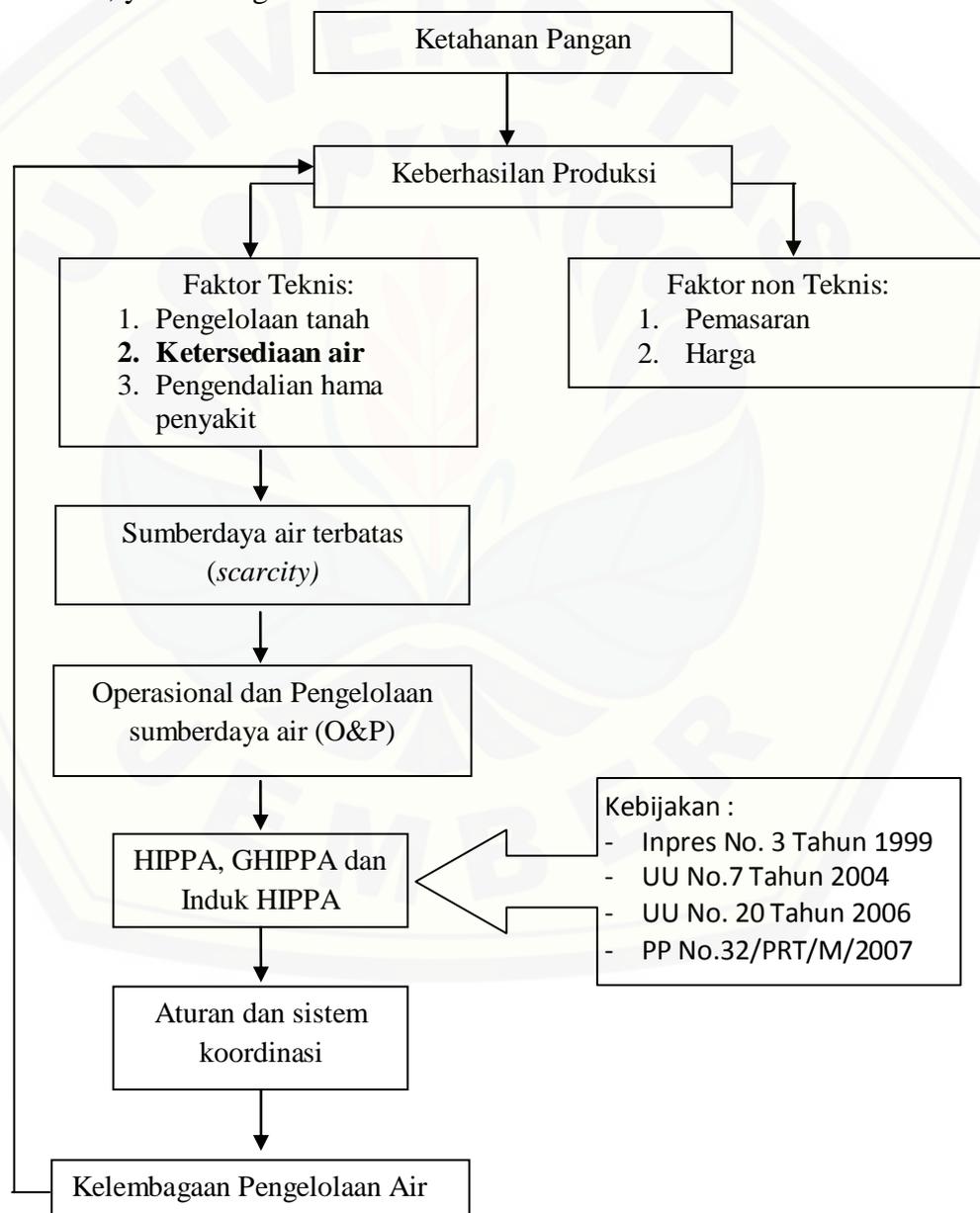
Pengelolaan air telah menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini diwujudkan dengan adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjadi dasar bagi pengelolaan air irigasi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah (1) Inpres no.3 Tahun 1999 terkait pengelolaan dana iuran air (IPAIR) sebagai salah satu sumberdana bagi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan irigasi oleh P3A/HIPPA, (2) Undang-undang no. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumberdaya air, (3) Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang irigasi antara lain diarahkan untuk memperbaiki kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, (4) Peraturan No.32/PRT/M/2007 menjelaskan tentang peran P3A/GP3A dan Induk P3A, serta masih banyak kebijakan yang lain. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mendorong terjadinya perubahan aturan dan tata kelola dalam pemnafaatan sumberdaya air. Pada titik ini, peran dari P3A/GP3A ataupun Induk P3A menjadi sebuah bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya air dimana peran dari ketiga lembaga lokal tersebut memiliki wewenang pada saluran yang berbeda.

Perubahan aturan dan tata kelola (*rule of the game*) dalam pengelolaan sumberdaya air yang disebabkan oleh adanya kebijakan oleh pemerintah telah mendorong terjadinya perubahan kelembagaan pada P3A/GP3A dan Induk P3A. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada lembaga lokal tersebut dapat dilihat dari perubahan peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Namun demikian, kebijakan pemerintah tidak selalu diimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya peran lembaga-lembaga

lokal tersebut dalam pengelolaan sumberdaya air dan masih adanya konflik kepentingan dalam pemakaian air. Dalam hal ini, menjadi perlu untuk meningkatkan peran lembaga lokal tersebut dalam pengelolaan sumberdaya air agar partisipasi dan peran lembaga tersebut menjadi lebih maksimal. Sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian guna terciptanya ketahanan pangan nasional.

Pada Gambar 2.1 akan disajikan diagram kerangka konseptual pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 akan menguraikan mengenai metodologi penelitian meliputi ruang lingkup dan lokasi penelitian, metode pengambilan data, metode penentuan informan, metode analisa data, disain penelitian dan batasan penelitian.

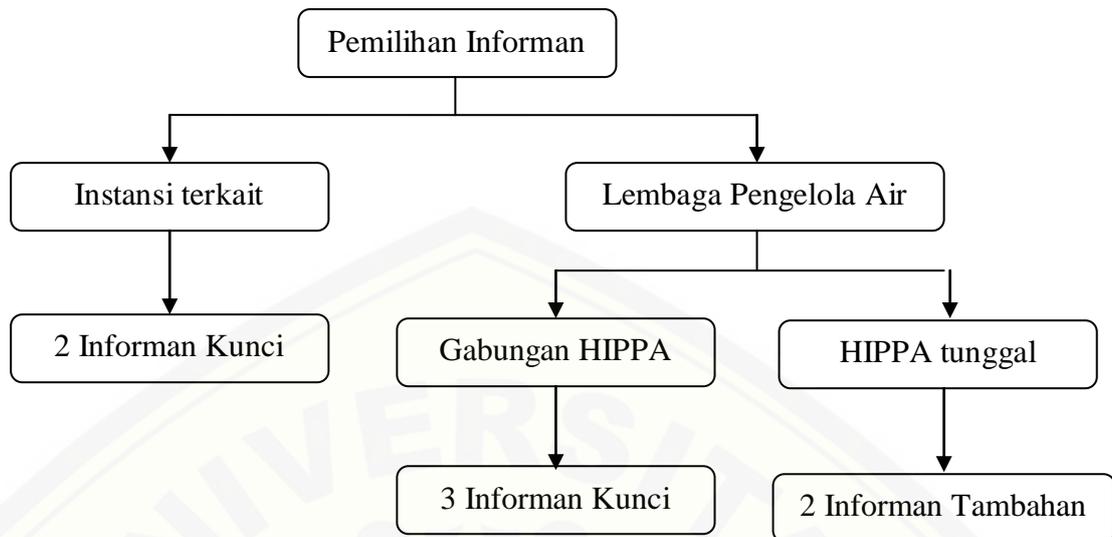
3.1 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Lingkup penelitian ini akan mempelajari dinamika kelembagaan GP3A/GHIPPA terutama yang berkaitan dengan kemandiriin pengelolaan sumberdaya air. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Situbondo. Penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober 2015.

3.2 Metode Penentuan Informan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada pendekatan kualitatif lebih menekankan pada analisa pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisa interaksi ekonomi yang dapat mendorong kemandirian GP3A/GHIPPA dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) saluran irigasi pada layanan blok sekunder, yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Metode penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih secara sengaja yang dianggap mengetahui atau memberikan gambaran yang lengkap terhadap focus penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri atas 5 informan kunci yaitu ketua ataupun pengurus GHIPPA serta informan dari instansi terkait dan 3 informan tambahan yaitu ketua ataupun pengurus HIPPA tunggal. Berikut akan disajikan Gambar 3.1 mengenai metode pemilihan informan, yaitu:



Gambar 3.1 Penentuan Informan

3.3 Metode Pengambilan Data

Pada penelitian ini terdapat dua pertanyaan empiris yang hendak dijawab, yaitu mengetahui pola kelembagaan ekonomi antara GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air serta disain kelembagaan GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo. Untuk menjawab dua pertanyaan empiris tersebut akan digunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

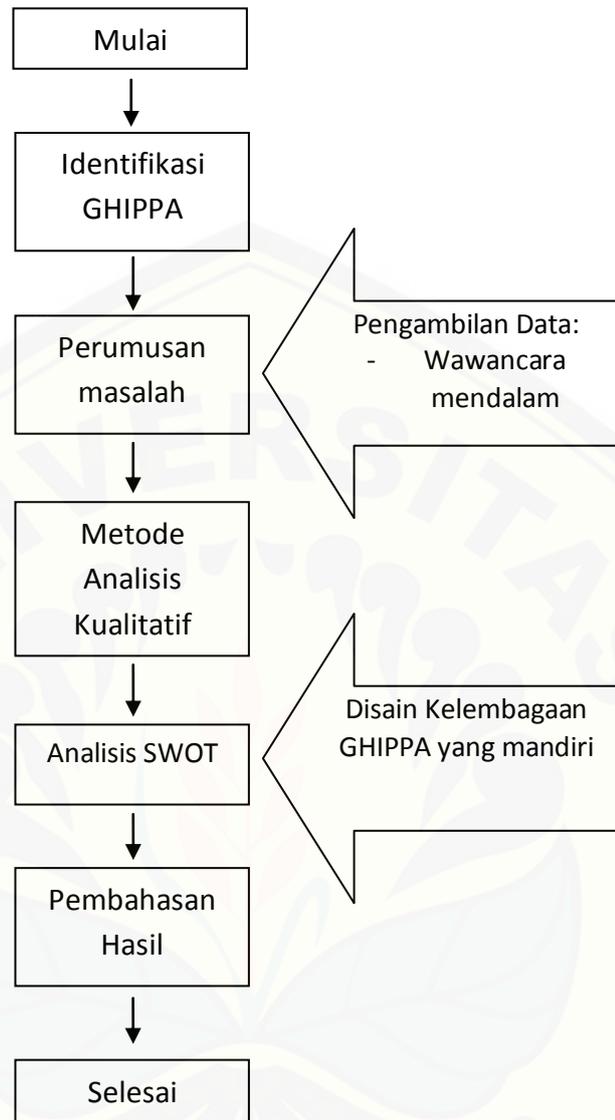
- a) Pertanyaan pertama akan dijawab dengan menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara (*indept interview*). Informasi terkait pola kelembagaan ekonomi antara GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air akan diperoleh dari GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA itu sendiri. Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara namun tetap terbuka. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung (bertatap muka) dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dan antara pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative sama (Bungin, 2001 dan Afriani, 2009).

- b) Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu disain kelembagaan GP3A/GHIPPA dan P3A/HIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian, peneliti menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*. Dalam metode ini, peneliti melakukan pertemuan dengan mengundang beberapa ketua/pengurus GHIPPA dan HIPPA serta Komisi Pengairan dan Instansi terkait untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya air serta penguatan kelembagaan GP3A/GHIPPA yang mandiri. Dalam hal ini jumlah peserta FGD dibatasi sejumlah 10 orang. FGD merupakan salah satu metode untuk menyaring pendapat, opini dan keinginan peserta terkait suatu permasalahan beserta harapan dan keinginannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian ketiga yaitu dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perumusan strategi dengan menganalisis factor-faktor internal dan eksternal dalam sebuah organisasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai teori SWOT dijelaskan pada sub bab 3.5.3.

3.4 Disain Penelitian

Disain penelitian diawali dengan langkah identifikasi jumlah dan kondisi GHIPPA di Kabupaten Situbondo, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan perumusan masalah. Setelah dilakukan perumusan masalah disusun sebuah metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Setelah dilakukan pengambilan data lapangan akan ditampilkan/disajikan data untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan membandingkannya dengan teori empiris yang ada. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada diagram alur berikut.



Gambar 3.2 Disain Penelitian

3.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif keadaan di lapangan dirangkai dari peristiwa-peristiwa yang unik dan merupakan hal yang sangat penting. Kondisi ini tidak dapat dibatasi pada nilai salah atau benar, juga tidak ada batasan angka-angka dan variabel-variabel. Peneliti berusaha memahami subyek penelitiannya dengan menggunakan kerangka berpikirnya sendiri (Taylor & Bogdan, 1984).

Terdapat dua metode analisis data pada penelitian ini, yaitu :

1. Pertanyaan empiris pertama akan dijawab menggunakan data yang dianalisis menggunakan metode analisis *interactive model analysis* yang

dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Dalam model ini menggunakan tiga komponen analisis yaitu :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan dilakukan berulang-ulang. Tujuan dari proses reduksi data adalah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

b. Penyajian data (*data display*)

Data display disajikan dengan cara menyusun sekumpulan informasi agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada untuk lebih diperjelas lagi dan lebih rinci. Kesimpulan yang diambil seharusnya dapat menggambarkan inti dari tema dan fokus pada penelitian. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

2. Analisis

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan pasar. Analisis ini didasarkan pada maksimalisasi kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunities*), serta meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 3.1 Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	Daftar Kekuatan Internal	Daftar Kelemahan Internal
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Daftar Peluang Eksternal	Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang.	Strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dengan mengatasi kelemahan
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Daftar Ancaman Eksternal	Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.	Strategi dengan meminumkan kelemahan dan mengkindari ancaman.

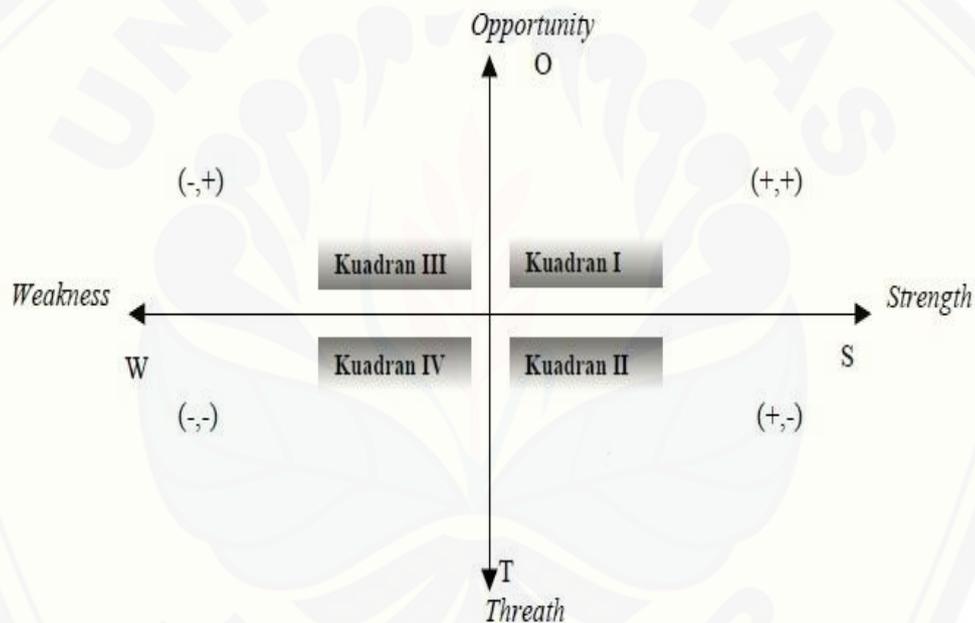
Sumber: Rangkuti, 2000.

Ada 8 langkah dalam penyusunan matriks SWOT:

- a. Uraikan semua peluang eksternal.
- b. Uraikan semua ancaman eksternal.
- c. Uraikan semua kekuatan internal.
- d. Uraikan semua kelemahan internal.
- e. Satukan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi yang mungkin.
- f. Satukan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi yang mungkin.
- g. Satukan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi yang mungkin.
- h. Satukan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi yang mungkin.

Analisis SWOT dapat menjadi bersifat sangat subjektif. Dimungkinkan terjadi apabila terdapat 2 peneliti yang menganalisis 1 perusahaan yang sama, namun menghasilkan SWOT yang berbeda. Dengan demikian hasil analisis SWOT hanya dapat digunakan sebagai arahan dan bukan sebagai pemecahan masalah. Pembuat analisis harus realistis dalam menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal. Kelemahan yang disembunyikan atau kekuatan yang tidak

terjabarkan akan membuat arahan strategi menjadi tidak dapat digunakan. Analisis harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi dan bukan situasi yang seharusnya terjadi. Penting juga untuk menghindari *grey areas*. Hal ini ditujukan untuk memudahkan membedakan antara kekuatan dan kelemahan, selalu hubungkan situasi yang dihadapi dengan persaingan yang sedang berjalan. Apakah perusahaan lebih baik dari kompetitor atau tidak. Terakhir, hindari kerumitan yang tidak perlu dan analisis yang berlebihan. Buatlah analisis SWOT sesingkat dan sesederhana mungkin, sehingga dapat lebih mudah dijadikan sebagai bahan masukan (David, 2004).



Gambar 3.3 Matriks Kuadran SWOT

Dari gambar 3.1 diatas dapat diketahui bagaimana matriks kuadran SWOT yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus

melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

b. Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

c. Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

d. Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk menjelaskan batasan-batasan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan yang tepat agar tujuan penelitian bisa tercapai. Definisi operasional pada penelitian ini adalah :

1. Kelembagaan GP3A/GHIPPA yang Mandiri

GP3A atau GHIPPA merupakan gabungan/kumpulan beberapa HIPPA sebagai lembaga lokal yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri untuk mengelola sumberdaya air irigasi secara mandiri, adil dan merata. Tugas dan tanggung jawab pengelolaan air pada saluran II (sekunder) menjadi kewenangan dari GHIPPA.

2. Pengelolaan Sumberdaya Air

Pengelolaan sumberdaya air merupakan usaha untuk mengatur pemakaian dan pemanfaatan air secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan dari pihak-pihak pemakai air. Pengelolaan sumberdaya air termasuk didalamnya adalah upaya pelaksanaan operasional dan pemeliharaan saluran agar pemanfaatan air menjadi lebih efisien.

3. Keberlangsungan Sektor Pertanian

Kebetersediaan air bagi sektor pertanian merupakan hal yang sangat vital. Dalam hal ini, ketersediaan air menjadi salah satu penentu keberhasilan produksi pertanian.

3.7 Limitasi Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan aspek analisa ekonomi kelembagaan pada hubungan dan aturan yang terjadi pada sistem koordinasi antara HIPPA dan GHIPPA dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya air. Dalam ahl ini, yang menjadi titik dasar penelitian adalah aturan main (*rule of the game*) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumberdaya air diantara kedua lembaga lokal tersebut. Interaksi kedua lembaga menjadi sangat penting untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (O&P) yang partisipatif sebagai implementasi kebijakan pengelolaan air secara mandiri.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Situbondo dengan pengambilan data akan dilakukan pada bulan Oktober 2015. Pengambilan data akan dilakukan pada tiga lembaga GHIPPA yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

BAB 5. PENUTUP

Bab 5 terdiri dari subbab 5.1 dan 5.2, dimana subbab 5.1 akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Pada subbab 5.2 akan mendeskripsikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam strategi untuk membangun kelembagaan GHIPPA yang mandiri.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap fokus dan tema penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pola kelembagaan GP3A/GHIPPA di Kabupaten Situbondo disusun oleh tiga komponen yaitu aturan formal, aturan informal dan sanksi sosial menjadi faktor yang mendasari pembentukan kelembagaan dalam pengelolaan air. Aturan formal yaitu berupa adanya landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), aturan informal yaitu nilai-nilai tradisional yang sudah berjalan di masyarakat seperti *ulu-ulu* air atau *lo benyo* dan mekanisme penegakan yaitu dengan adanya sanksi moral bagi petani yang melakukan penyalahgunaan air atau pengingkaran dalam membayar iuran air.
- b. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap posisi organisasi, maka GHIPPA berada pada kuadran III dimana posisi GHIPPA berada dalam kondisi yang lemah tetapi menghadapi peluang yang besar. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk menangkap peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh GHIPPA. Rumusan desain kelembagaan GHIPPA yang mandiri adalah:
 1. Menyusun program kerja GHIPPA
 2. Menerapkan program kerja yang telah disusun
 3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja, Menyusun AD/ART setiap tahun

4. Memperbaiki AD/ART yang sudah tidak sesuai
5. Melakukan evaluasi AD/ART
6. Melaksanakan AD/ART yang sudah dibuat
7. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan organisasi agar sesuai AD/ART
8. Memberikan sanksi apabila terjadi pengabaian pelaksanaan AD/ART
9. Membangun usaha ekonomi lain sebagai sumber pendapatan GHIPPA, seperti membuka toko Saprodi Pertanian, membuka unit simpan pinjam dll
10. Mengakses bantuan dana pada Pemerintah untuk pembiayaan pemeliharaan saluran sekunder yang membutuhkan biaya besar
11. Membantu HIPPA untuk mengatur keuangannya, sehingga HIPPA memiliki kas dan dapat melakukan penyetoran pada akas GHIPPA

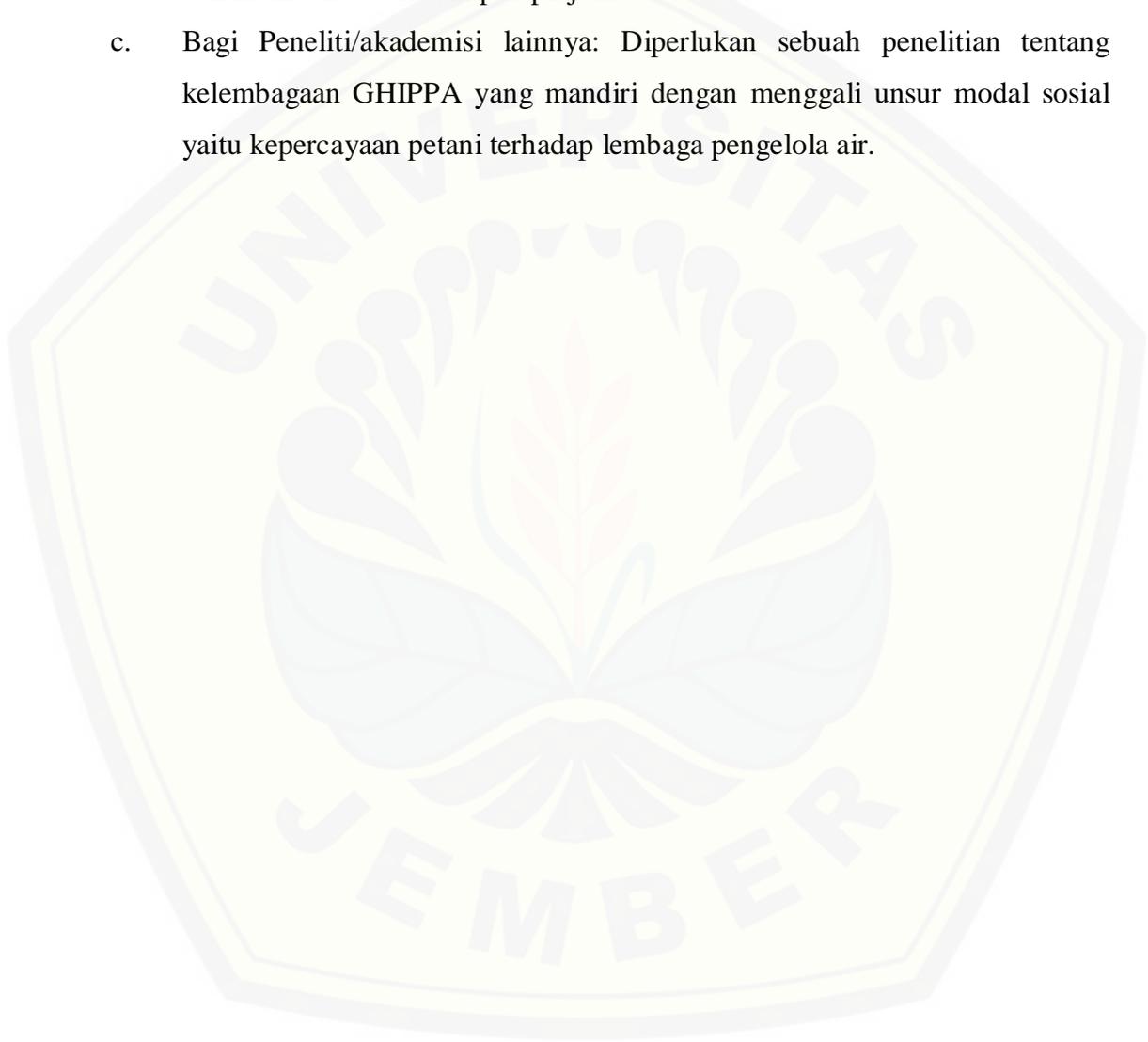
5.2 Saran

Berdasarkan rujukan data serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maka, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat di rumuskan oleh peneliti adalah:

- a. Bagi Pemerintah: Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembentukan pola kelembagaan GHIPPA yang mandiri. Kebijakan yang dapat rumuskan antara lain: Regulasi penganggaran yang memihak kepada pendanaan operasional dan pemeliharaan (OP) GHIPPA untuk pengelolaan saluran sekunder, penganggaran untuk lebih intens melakukan pembinaan dan pelatihan kepada GHIPPA terkait peningkatan GHIPPA dalam mencari solusi teknis ataupun solusi kelembagaan, menyusun kebijakan yang dapat menjadi landasan bagi GHIPPA untuk ikut membahas pendistribusian air dari saluran sekunder ke saluran primer, dan meningkatkan pertemuan dan koordinasi Komisi Irigasi dengan lembaga pengelola air dibawahnya.
- b. Bagi GHIPPA: Agar GHIPPA dapat melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan AD/ART dan program kerja yang menjadi pedoman bagi jalannya GHIPPA. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan AD/ART

merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan petani terhadap lembaga pengelola air yang kompeten. Selain itu, kemandirian GHIPPA dapat diperoleh apabila GHIPPA memiliki kegiatan ekonomi sebagai sumber pendapatan yang dapat membiayai semua aktivitasnya, seperti membuka toko saprodi pertanian, menyewakan alat-alat pertanian, dan membuka usaha simpan pinjam.

- c. Bagi Peneliti/akademisi lainnya: Diperlukan sebuah penelitian tentang kelembagaan GHIPPA yang mandiri dengan menggali unsur modal sosial yaitu kepercayaan petani terhadap lembaga pengelola air.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, H.S.I.2009.*Metode Kualitatif*. <http://kualitatif.htm.com>, diakses tgl 5 September 2015
- Agunggunanto, Edy Yusuf., 2011. *Analisis Kemiskinan Dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 1, Juli 2011
- Arrow, K.J. 1965. *Aspect of Theory of Risk Bearing*. Helsinki: Yrgo Jahnssoin
- Bardhan, Pranab. 1989. Alternative Approaches to The Theory of Institutions in Economics Development. Dalam Pranab Bardhan. (ed). *The Economic Theory of Agrarian Institutions*. Clarendon Press. Oxford
- Barret, Christopher B. and Thomas Reardon. 2000. Asset, Activity, and Income Diversification Among African Agriculturist: Some Practical Issues.*Paper. Cornell University, Ithaca*
- Barret, Christopher B, Thomas Reardon and Patrick Webb. 2001. Nonfarm Income Diversification and Household Livelihood Strategies in Rural Africa: Concept, Dynamics, and Policy Implications. *Paper.Cornell University. Ithaca*
- Bickenbach, Frank, *et al.* 1999. *The New Institutional Economics of Antitrust and Regulation*. The Kiel Institute of World Economics. Kiel
- Brousseau, Eric, *et al.* 2011. *Insstitutional Changes: Alternative Theories and Consequences for Institutional Design*. *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 79: 3-19
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Chairiri, A. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*.Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. <http://staf.undip.ac.id/akuntansi/anis/>., diakses tgl 7 September 2015

- Chayanov, A.V. 1927. *The Theory of Peasant Rconomy*.The University of Wisconsin Press.
- Commons, John R. 1931. *Institutional Economics*. *American Economic Review*. Vol. 21, Issue 4, December: 648-657
- Cramb, R., Colfer, C., Dressler, W., Laungaramsri, P., Le, Q., Mulyoutami, E., Peluso, N., & Wadley, R. 2009. *Swidden Transformations and Rural Livelihoods in Southeast Asia*. *Human Ecology*, 37 (3), 323-346.
- Cresswell, J.W. 1994. *Research Design: Quantitative And Qualitative Approach*. London: Sage
- Ellis, Frank. 1998. Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. *The Journal of Development Studies* Vol 35, No 1.
- . 2000. *Rural Livelihood and Diversity in Developing Countries*. Oxford University, Oxford
- Hardono, Gatot Sroe dan Handewi P. Saliem. 2002. *Diversifikasi Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia: Analisis Data Susenas*.Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Harper, D & Gillepie, G. 1997.Give and Take Among The Rural Poor. *The International Journal of Sociology and Social Policy*, 17, 102-129
- Harrison, Mark. 1975. Chayanov and The Economics of The Russian Peasantry. *Journal of Peasant Studies* 2:4 (1975), pp. 389-417
- Hart, G. 1986. *Power, Labour and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. University of California Press. Barkeley
- Hodgson, Geoffrey M. 1998. The Approach of Institutional Economics. *Journal of Economics Literature*. Vol. 36, Issue 1, March: 166-192
- Hira, Anil dan Ron Hira. 2000. The Institutionalism: Contradictory Notions Of Change. *American Journal of Economics and Sosiology*. Vol. 59 No.2, April: 267-282
- Kasper, Wolfgang dan Manfred E. Streit. 1998. *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Edward Elgar. Asldershot (UK) and Vermont (USA)

- Lopa, Rita T., dan Farouk Maricar. 2013. Kajian Proses Penguatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi yang Berwawasan Lingkungan. *Konfrensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 24-26 Oktober 2013
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta
- Manig, Winfried. 1991. *Structural and Institutional Changes in Rural Northwest Pakistan. The Journal Of Development Studies*. Vol. XII: 1-20
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Methods*. California: Sage
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nabli, Mustapha K. dan Jeffrey B. Nugent. 1989. The New Institutional Economics and Economics Development: An Introduction. Dalam Nabli, Mustapha K. dan Jeffrey B. Nugent. (eds.). *The New Institutional Economics and Development: Theory and Application to Tunisia*. North-Holand. Amsterdam. The Netherlands.
- North, Douglass C. 1990. Institutions and Transaction-cost Theory of Exchange. Dalam James E. Alt and Kenneth A. Shepsle. *Perspectives on Positive Political Economy*. Cambridge University Press. Cambridge.
- . 1994. *Economic Performance Through Time. The American Economic Review*. Vol. 84, Issue 3, June : 359-368
- Samuelson, Paul dan Nordhaus, 1999, *Mikro Ekonomi*, Ed XIV, Erlangga, Jakarta
- Scoones, I. 1998. Sustainable Rural Livelihood: A Framework For Analysis. *IDS Working Paper. No.72. Brighton: IDS*
- Taylor, S.J dan Bogdan, R. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search For Meaning, Second Edition*, Toronto: John Wiley and Sons
- Vatn, Arild. 2006. *Institutions. Departement of Economics and Resource Management Norwegian University of Life Sciences*. http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions_Arild_Vatn.pdf. Diakses pada 4 September 2015

- Widodo, Slamet. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir. *Makara, Sosial Humaniora, Vol.15, No.1, Juli 2011: 10-20*
- . 2012. Penguatan Modal Sosial untuk Pengembangan Nafkah Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Makalah Seminar Nasional. Universitas Sebelas Maret. 19 April 2012. ISBN 978-979-17638-9-9*
- Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*. Vol. 38, pp. 595-613.
- Yeager, Timothy J. 1999. *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. Political Economy of Global Interdependence. Oxford
- Yusdja, dkk. 2004. Analisis Peluang Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Petani Melalui Pengelolaan Usahatani Bersama. *Jurnal Agro Ekonomi, Volume 22 No.1, Mei 2004: 1-25*
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- . 2006. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori & Strategi*. Malang: Bayu Media.
- . 2012. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga
- Wardhono, et al, 2004, *Analytic Hierarchy Process: Pengantar dan Aplikasi*, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Sosial, Jember

1. Bapak Sr, Umur 51 th, GHIPPA Rengganis Jaya, Kec. Sumbermalang	
Peneliti	: Apa GHIPPA Rengganis Jaya sudah berbadan hukum?
Informan	: iya sudah Pak, sudah sekitar 3 tahun yang lalu, lupa saya
Peneliti	: Sudah berapa lama menjadi pengurus GHIPPA?
Informan	: sudah lama Pak, sudah 3 tahun
Peneliti	: Bagaimana proses pemilihan ketua dan pengurus GHIPPA?
Informan	: ya dipilih pakai pemilihan Pak, dalam rapat yang dihadiri perwakilan HIPPA dan beberapa petani
Peneliti	: Apakah GHIPPA rutin melakukan rapat dengan petani?
Informan	: tidak rutin, hanya sewaktu-waktu dibutuhkan kalau pas ada masalah pembagian air di HIPPA
Peneliti	: Apa program-program GHIPPA di wilayah Bapak?
Informan	: belum ada pak, disini GHIPPA nya kurang aktif. Antar pengurus hanya sebatas koordinasi pas ada masalah saja. Jadi ya belum ada itu program kerja, rapat pengurus juga belum ada selama saya jadi ketua.
Peneliti	: Tapi koordinasinya baik ya Pak?
Informan	: iya, karena kan antar pengurus kan kenal baik jadi gampang kalau mau koordinasi. GHIPPA itu kan gabungan beberapa HIPPA yang letaknya didesa-desa, jadi jauh itu kalo mau rapat. Ya paling koordinasi lewat telpon saja, ndak pernah ngumpul.
Peneliti	: Kalau rapat penyusunan AD/ART gimana Pak?
Informan	: ya ndak ada juga Pak, masih pake yang lama saja. Ndak aktif ini Pak GHIPPA. Biasanya AD/ART disusunnya ya 5 tahunan tapi ndak ada.
Peneliti	: GHIPPA ada kas Pak?
Informan	: ndak ada pak, kalau di AD/ART harusnya ada. Kas dari setoran HIPPA. Tapi gimana mau nyetor kadang HIPPA nya ya gak punya kas juga itu Pak.
Peneliti	: mungkin GHIPPA punya usaha ekonomi pak untuk nambah kas?
Informan	: usaha seperti apa itu? Ndak ada Pak, kita kan cuma ngumpul untuk masalah pengelolaan air saja. Ndak ada itu usaha lain. Kalau usaha pribadi ya ada.
Peneliti	: kalau pemeliharaan saluran siapa yang mendanai pak?
Informan	: GHIPPA itu kan di saluran sekunder, saluran sekunder itu masih kewenangan dinas. Jadi kalau ada perbaikan besar ya dinas yang bikin proyek tapi kalau Cuma bersih-bersih ya kadang kita sama petani.
Peneliti	: dananya dari mana pak?
Informan	: Dana pemeliharaan ya swadaya petani, kita gotong royong la..kerja bakti bersama, ada HIPPA juga.
Peneliti	: Apa GHIPPA juga ikut menentukan jadwal giliran pembagian air?

Informan	:	iya menjelang MK 2, koordinasi sama HIPPA dan subblok juga.
Peneliti	:	apa menyusun rencana tanam juga?
Informan	:	oo ndak, ndak sampek kesana. Biasanya itu subblok yang buat.
Peneliti	:	Hubungan antara GHIPPA dan HIPPA seperti apa Pak?
Informan	:	ya hanya koordinasi saja, terkait pengelolaan air. Itu juga niasanya kalau pas lagi ada masalah saja. Karena kan yang langsung berhubungan itu subblok, biasanya subblok koordinasi sama juru pengairan. HIPPA atau GHIPPA hanya support saja.
Peneliti	:	jadi sebenarnya peran GHIPPA dalam pengelolaan irigasi apa Pak?
Informan	:	ya itu ya, saya juga bingung. Gak berperan kayaknya. Karena yang lebih banyak berperan itu kan subblok. HIPPA saja kadang gak aktif, apalagi GHIPPA. Kita gak ada program juga, gak punya dana juga.
Peneliti	:	Apa ada pembinaan dari pemerintah Pak?
Informan	:	ya ada, tapi sewaktu-waktu saja. Tapi ya gitu Pak, setelah itu ya sudah hanya formalitas saja. GHIPPA nya tetap ndak jalan.
Peneliti	:	Kalau sama pemerintah desa gimana pak?
Informan	:	ya ndak ada malah, HIPPA yang koordinasi dengan desa.
Peneliti	:	mungkin ada hubungan kerja dengan lembaga non pemerintah Pak terkait pengelolaan irigasi?
Informan	:	ndak ada pak
Peneliti	:	Kalau dengan Komisi irigasi Kabupaten?
Informan	:	belum ada, kita belum ada koordinasi dengan lembaga manapun. Cuma sama HIPPA saja.
Peneliti	:	kalau hubungan sama ulu-ulu air atau subblok gimanaPak?
Informan	:	biasanya kan yang berhubungan langsung ke subblok ya HIPPA, kita ndak.
Peneliti	:	Apa GHIPPA ada program untuk mempertahankan kelestarian sumber air?
Informan	:	belum ada pak, belum merencanakan itu.
Peneliti	:	Jadi peran GHIPPA apa Pak?
Informan	:	ya itu cuma asal ada saja, ikut bersihkan saluran sekunder, gotong royong sama petani. Gimana ya, program juga gak punya kita ini.
Peneliti	:	Trus harapan Bapak apa?
Informan	:	pengennya itu HIPPA nya jalan dulu, karena kalau HIPPA jalan ada harapan GHIPPA juga jalan. Karena pengurus GHIPPA kan dari HIPPA. Kalau HIPPA jalan, bisa jadi akanada kas yang disetorkan ke GHIPPA baru dari situ kita bisa buat program kerja.
Peneliti	:	berarti tergantung dana ya Pak?
Informan	:	ya ndak dana saja Pak, itu hanya salah satu. Kemampuan SDM pengurus juga sama pembinaan dari instansi terkait.

2. Bapak Sh, Umur 46th, GHIPPA Subur Makmur, Kec. Besuki	
Peneliti	: Apa GHIPPA Subur Makmur sudah berbadan hukum?
Informan	: iya sudah Pak
Peneliti	: Sudah berapa lama menjadi pengurus GHIPPA?
Informan	: sekitar 4 tahun yang lalu
Peneliti	: Bagaimana proses pemilihan ketua dan pengurus GHIPPA?
Informan	: pakai voting Pak, ada rapat anggota GHIPPA lima tahunan
Peneliti	: Apakah GHIPPA rutin melakukan rapat dengan petani?
Informan	: ya kadang-kadang, kalau diperlukan
Peneliti	: Apa program-program GHIPPA di wilayah Bapak?
Informan	: Gak punya program Pak GHIPPA, kalau di AD/ART ya ada tapi pelaksanaannya itu ndak ada. Itu juga kan AD/ART nya pakai yang lama yang dari jaman dulu itu.
Peneliti	: Tapi koordinasinya baik ya Pak antar pengurus?
Informan	: ya baik sih, kenal kan. Pengurus GHIPPA kan biasanya juga ketua atau pengurus HIPPA di desa. Kadang ya orangnya itu2 saja, dipilih lagi dipilih lagi. Ndak berubah, walaupun ada yang berubah ya paling pengurus diangkat jadi ketua. Ya kenal baik jadinya.
Peneliti	: Kalau rapat penyusunan AD/ART gimana Pak?
Informan	: ndak ada Pak, AD/ART nya pakai yang lama kan masih.
Peneliti	: GHIPPA ada kas Pak?
Informan	: belum ada, mau dapat kas dari mana. Gak ada sumbernya.
Peneliti	: mungkin GHIPPA punya usaha ekonomi pak untuk nambah kas?
Informan	: belum ada
Peneliti	: kalau pemeliharaan saluran siapa yang mendanai pak?
Informan	: pakai dana program dari dinas pak, dulu kita ikut sewaktu ada rehabilitasi saluran sekunder di curah suri. Yang mendanai ya dari proyek dinas pengairan.
Peneliti	: Apa GHIPPA juga ikut menentukan jadwal giliran pembagian air?
Informan	: iya
Peneliti	: apa menyusun rencana tanam juga?
Informan	: iya saya pernah dipanggil ke UPTD Besuki untuk bersama-sama menyusun jadwal tanam sekaligus ya itu tadi pembagian air. Ada subblok sama juru juga.
Peneliti	: Hubungan antara GHIPPA dan HIPPA seperti apa Pak?
Informan	: ya sesekali saja koordinasinya. Hampir ndak ada malah ya.
Peneliti	: jadi sebenarnya peran GHIPPA dalam pengelolaan irigasi apa Pak?
Informan	: Perannya ya membantu HIPPA dalam pengaturan air irigasi

		biar efektif, sama membantu dinas pengairan kalau ada rehabilitasi saluran sekunder. Karena wilayah kita kan di saluran sekunder kalau saluran tersier jadi kewenangan HIPPA itu.
Peneliti	:	Apa ada pembinaan dari pemerintah Pak?
Informan	:	ada, hanya sewaktu-waktu saja. Kurang kayaknya.
Peneliti	:	Kalau sama pemerintah desa gimana pak?
Informan	:	belum ada
Peneliti	:	mungkin ada hubungan kerja dengan lembaga non pemerintah Pak terkait pengelolaan irigasi?
Informan	:	belum ada
Peneliti	:	Kalau dengan Komisi irigasi Kabupaten?
Informan	:	komisis irigasi itu jarang turun ke lapangan, kita ndak pernah berhubungan. Sulit.
Peneliti	:	kalau hubungan sama ulu-ulu air atau subblok gimanaPak?
Informan	:	belum ada, subblok koordinasinya sama HIPPA atau juru
Peneliti	:	Apa GHIPPA ada program untuk mempertahankan kelestarian sumber air?
Informan	:	belum ada Pak
Peneliti	:	Jadi peran GHIPPA apa Pak?
Informan	:	ya itu tadi membantu pengaturan air, membantu HIPPA kalau ada masalah.
Peneliti	:	Trus harapan Bapak apa?
Informan	:	kalau bisa ya GHIPPA harus ada kegiatan biar aktif gak vakum seperti ini.
Peneliti	:	berarti harus ada program ya Pak?
Informan	:	iya, harus punya program yang jelas sama ada dana juga. Gimana program mau jalan kalau tidak ada dana

3. Bapak Ts, Umur 46 th, GHIPPA Sekar Ayu, Kec. Banyuputih		
Peneliti	:	Apa GHIPPA Subur Makmur sudah berbadan hukum?
Informan	:	sudah Pak
Peneliti	:	Sudah berapa lama menjadi pengurus GHIPPA?
Informan	:	sekitar 5 tahunan
Peneliti	:	Bagaimana proses pemilihan ketua dan pengurus GHIPPA?
Informan	:	Ada rapat anggota, orang-orang HIPPA, kemudian diusulkan beberapa nama..terus di pilih suara terbanyak.
Peneliti	:	Apakah GHIPPA rutin melakukan rapat dengan petani?
Informan	:	ndak rutin, tapi dalam satu tahun ya ada. Minimal 3 kali dalam satu tahun, biasanya membahas masalah pemeliharaan saluran sekunder kayak ngeruk sedimen atau kerja bakti bersih-bersih saluran
Peneliti	:	Apa program-program GHIPPA di wilayah Bapak?

Informan	:	kalau di AD/ART kan itu pengelolaan atau pembagian air sesuai wilayah desa masing-masing, tergantung luasnya juga
Peneliti	:	koordinasi antar pengurus gimana Pak?
Informan	:	baik, beberapa pengurus cukup aktif kok
Peneliti	:	Kalau rapat penyusunan AD/ART gimana Pak?
Informan	:	ada 3 tahun sekali, biasanya AD/ART yang lama yang sudah sudah tidak sesuai ya kita rubah jadi ndak ganti total Cuma penyesuaian saja
Peneliti	:	GHIPPA ada kas Pak?
Informan	:	tidak ada, kas nya kosong. Karena HIPPA gak setor, kan harusnya GHIPPA itu dapat dari HIPPA. Kalau tidak salah di AD/ART itu setoran ke GHIPPA 5000/Ha/panen. Tapi ndak ada setoran, jadi ya kosong.
Peneliti	:	mungkin GHIPPA punya usaha ekonomi pak untuk nambah kas?
Informan	:	Tidak
Peneliti	:	kalau pemeliharaan saluran siapa yang mendanai pak?
Informan	:	ya kerja bakti Pak, dananya swadaya. kan hanya bersih-bersih
Peneliti	:	Apa GHIPPA juga ikut menentukan jadwal giliran pembagian air?
Informan	:	tidak, itu sudah diatur juru. Kalau pembagian air ke petani kan sudah diatur subblok
Peneliti	:	apa menyusun rencana tanam juga?
Informan	:	iya dengan koordinasi sama HIPPA, HIPPA sama subblok
Peneliti	:	Hubungan antara GHIPPA dan HIPPA seperti apa Pak?
Informan	:	kalau diperlukan koordinasi ya kita koordinasi, kondusif la pak pokoknya
Peneliti	:	jadi peran GHIPPA dalam pengelolaan irigasi apa Pak?
Informan	:	Berkoordinasi sama HIPPA dalam pengelolaan irigasi, sifatnya ya koordinasi saja. Pendistribusian air yang ngatur kan subblok. GHIPPA hanya membantu HIPPA memantau kondisi air disaluran sekunder.
Peneliti	:	Apa ada pembinaan dari pemerintah Pak?
Informan	:	ada sih, tapi kurang
Peneliti	:	Kalau sama pemerintah desa gimana pak?
Informan	:	ndak ada
Peneliti	:	mungkin ada hubungan kerja dengan lembaga non pemerintah Pak terkait pengelolaan irigasi?
Informan	:	ada, sesekali.
Peneliti	:	Kalau dengan Komisi irigasi Kabupaten?
Informan	:	tidak, jarang sekali kayaknya
Peneliti	:	kalau hubungan sama ulu-ulu air atau subblok gimana Pak?
Informan	:	sekarang namanya subblok, ya baik si, tapi kan koordinasinya kita lewat HIPPA
Peneliti	:	Apa GHIPPA ada program untuk mempertahankan kelestarian

		sumber air?
Informan	:	belum ada Pak
Peneliti	:	Trus harapan Bapak apa?
Informan	:	Agar GHIPPA lebih aktif lagi, lebih mandiri
Peneliti	:	berarti harus ada program ya Pak?
Informan	:	iya AD/ART nya harus jelas, pelaksanaannya juga harus jelas
4. Bapak As, Umur 61th, HIPPA Al Barokah, Kec. Besuki		
Peneliti	:	Sudah berapa lama pak jadi ketua HIPPA?
Informan	:	Sudah lama pak, hamper 5 tahun
Peneliti	:	Berarti sebentar lagi berakhir ya pak masa baktinya?
Informan	:	Ya tergantung pak, kalau ada yang mau gantikan ya berakhir. Kalau ndak ada ya gimana lagi. Pengennya sih ndak lanjut saya, HIPPA ini gak jalan.
Peneliti	:	Gak jalan gimana Pak?
Informan	:	Ya kurang perannya. Cuma ada nama tapi gak punya program kerja.
Peneliti	:	Belum ada program kerja pak? Tahun lalu gimana?
Informan	:	Ya ndak ada juga, mau bikin program kerja gimana, HIPPA itu kan ngurus air, ngatur air, tapi kan dilapangan sudah ada subblok. Petani biasanya urusan air ya lebih percaya ke subblok. HIPPA ini kan Cuma mantau ibaratnya. Kalau ada rapat di Kabupaten baru ada kegiatan.
Peneliti	:	Kalau rapat itu pembinaan pak?
Informan	:	Iya, pembinaan ke HIPPA, kadang ya dari pertanian kadang dari pengairan. Masalah teknis kadang ya masalah organisasi.
Peneliti	:	Sering ya pak ada pembinaan?
Informan	:	Ndak juga pak, jarang
Peneliti	:	Terus HIPPA apa pak perannya?
Informan	:	Ya itu ya, apa ya. Ngawasi air itu, pembagiannya di lapangan gimana, cukup apa ndak, lancar apa ndak.
Peneliti	:	Gimana pak, apa ada masalah di pembagian air.
Informan	:	Buh, nika benni masalah pole pak. Sekarang nika kan nimor. Aing kenik. Gi pastena rang korang petani.
Peneliti	:	HIPPA ngasih solusi apa Pak?
Informan	:	Ya ndak ada, paling ya kita Tanya ke subbloknnya kenapa. Tapi ya sudah tau jawabannya, sobung aing gerua pon deri bendung. Beremma pole.
Peneliti	:	Disini ndak ada yang pakai pompa Pak?
Informan	:	Ya ada pak, beberapa. Ndak semua. Pompa itu bendena raje Pak. Biaya solar, biaya se ngangkok pompa, melle pompana, pipa..gi mon se Sabena bennyak gik kellar melle pompa, mon perak nik sakunik gi tak cocok pak.
Peneliti	:	Solusi dari subblok gimana Pak?
Informan	:	Ya, dicarikan air ampongan. Kalau ada, kalau ndak ada ya

		gimana lagi.
Peneliti	:	Apa HIPPA punya kas Pak?
Informan	:	Itu yang repot saya jawabnya. Gimana ya?
Peneliti	:	Kenapa pak?
Informan	:	Harusnya kan ada, dari setoran iuran air. Tapi ya HIPPA mau minta ke subblok ya gimana, ndak enak, ndak kerja kok minta uangnya. Apalagi HIPPA kan ndak punya program kerja.
Peneliti	:	Harusnya HIPPA dapat berapa persen Pak?
Informan	:	Kalau ndak salah 5%, 2,5% untuk HIPPA, 2,5% untuk kas desa. Tapi gi sobung gerua Pak deri Subblok. Pon tak mangkak kia napon, jek reng Subblok bik Tokang torap ni se ngoros aing kabbi. HIPPA nika kan perak diatas kertas, gellu na. tadhek napa wa.
Peneliti	:	Yang nentukan 5% siapa pak?
Informan	:	Ya AD/ART, rapat HIPPA.
Peneliti	:	Punya AD/ART ya pak?
Informan	:	Ada Pak, tapi ya gitu da. Ndak dipakai.
Peneliti	:	Jarang ngadakan pertemuan apa Pak?
Informan	:	Jarang Pak, ndak ada yang mau dirapatkan. Ya paling kalau pas ada masalah, ada tokar. Tapi jarang.
Peneliti	:	Berarti subblok ndak nyetor ke HIPPA ya pak?
Informan	:	Ke kas ya? Ndak ada Pak
Peneliti	:	Menurut bapak, kenapa HIPPA disini kok bisa gak jalan?
Informan	:	Itu mungkin ya, petani sudah percaya nya yak e subblok, biasa ngurus air yak e subblok, kalau ada masalah ya subblok yang ngatasi.
Peneliti	:	Selain itu pak?
Informan	:	Karna ndak punya program kerja itu HIPPA, gak punya akas, pengurusnya juga kan ndak jelas.
Peneliti	:	Tapi petani tau kalau Bapak ketua nya?
Informan	:	Korang oning jugen gi Pak, mungkin tau yang domisili disini. Yang orang luar mungkin gak tau.
Peneliti	:	O ada yang orang luar Pak?
Informan	:	Iya, orang luar desa sekitar sini. Kadang punya sawah disini, ada juga yang orang luar tapi nyewa sawahnya disini.
Peneliti	:	Anggota HIPPA itu semua petani ya Pak?
Informan	:	Iya semua petani yang punya sawah disini, yang domisili atau ndak.
Peneliti	:	Yang bisa jadi pengurus itu petani atau boleh bukan petani?
Informan	:	Petani boleh, orang luar boleh. Yang penting forum setuju.
Peneliti	:	Berarti bisa ya pak?
Informan	:	Ya tergantung forum Pak. Disini dulu pernah ada ketua HIPPA orang desa sebelah, tapi sawahnya banyak disini, aslinya orang sini cuma nikah sama orang des asana. Pokonya ya kalau forum setuju, ya ndak papa itu.

Peneliti	:	Disini iuran air berapa ya Pak?
Informan	:	Tergantung musim Pak, kalau kayak sekarang ini pas ndak ada air ya agak mahal kadang nyampek 50rb, kalau pas hujan ya paling 20 rb.
Peneliti	:	Oo gak sama ya pak?
Informan	:	Iya ndak sama Pak, petani itu punya istilah MH MK1 dan MK2.
Peneliti	:	Gimana itu Pak?
Informan	:	Kalau MH itu musim hujan, petani nanam padi, kalau MK 1 itu musim kemarau pertama nanam jagung atau cabe, kalau MK2 itu musim kemarau kedua, sulit itu air.
Peneliti	:	Trs iurannya pak?
Informan	:	Kalau MH 20rb/kotak, kalau MK1 35/kotak, kalau MK 2 ya 50 rb/kotak
Peneliti	:	Bayarnya ke subblok ya pak?
Informan	:	Iya ke subblok sama toking torap itu da. Kan yang ngatur air subblok sama toking torap.
Peneliti	:	HIPPA ikut ngatur pola tanam gak Pak?
Informan	:	Ndak ada itu, biasanya subblok punya pola tanam dapat dari juru.
Peneliti	:	Kalau pemeliharaan saluran gimana pak?
Informan	:	Ya di urus sama subblok juga
Peneliti	:	HIPPA?
Informan	:	Ndak ada pak, ya kalau diajak kerja bakti ya ikut. Tapi kadang kalau saya jalan-jalan pas liat ada saluran yang rusak ya saya tegur subbloknnya. Tapi biasanya sudah tau itu subbloknnya.
Peneliti	:	Iya wes Pak, terima kasih informasinya.

5. Bapak Ah, Umur 46 th, HIPPA, Kec. Kendit		
Peneliti	:	Musim kemarau gini air gak kurang pak?
Informan	:	Ya kurang pak, tapi Alhamdulillah masih bisa di atasi
Peneliti	:	Gimana caranya pak?
Informan	:	Ya ndak maksudnya, gak ada masalah. Petaninya nerima kalau kurang air, ndak ada ribut-ribut, ndak ada nyuri-nyuri air.
Peneliti	:	Oo gitu..petani disini patuh ya pak sama HIPPA?
Informan	:	Bukan patuh si pak, tapi kan sudah keadaannya kayak begini. Semua juga kurang air. Mau marah mau apa ya tetep kurang airnya.
Peneliti	:	Oo gitu..trus, upaya HIPPA apa Pak?
Informan	:	Kita kan rutin ada pertemuan, minimal sebulan sekali, ada arisan, sama subblok juga, ya disitu kita bicara kalau ada masalah. Jadi masalahnya ndak sampek besar.
Peneliti	:	Yang hadir siapa aja pak?

Informan	:	Sebenarnya bukan khusus pertemuan HIPPA, tapi pertemuan petani, HIPPA sama subblok juga datang, silaturahmi la istilahnya. Sama orang dinas juga ada, PPL atau mantra tani. Ndak khusus bahas masalah air, masalah pertanian la pokoknya.
Peneliti	:	Rutin ya pak? Kalau pertemuan HIPPA sendiri gimana pak?
Informan	:	Ya rutin pertemuan poktan itu, kalau HIPPA kadang-kadang kalau pas lagi ada acara atau kegiatan.
Peneliti	:	Kegiatan seperti apa itu pak?
Informan	:	Kalau ada proyek dari pertanian atau kalau ada acara bersih-bersih saluran.
Peneliti	:	Berapa bulan sekali itu pak?
Informan	:	Tergantung, kadang satu bulan sekali kadang dua bulan sekali..kadang juga seminggu sekali. Kayak pas lagi ada banjir misalnya, hamper seminggu sekali kita ketemu, bahas masalah pembersihan saluran.
Peneliti	:	Disini sering banjir pak?
Informan	:	Iya, kadang2 kalau air besar dari gunung
Peneliti	:	kalau pemeliharaan saluran siapa yang mendanai pak?
Informan	:	ya kerja bakti Pak, dananya swadaya.kan hanya bersih-bersih
Peneliti	:	Apa GHIPPA juga ikut menentukan jadwal giliran pembagian air?
Informan	:	tidak, itu sudah diatur juru. Kalau pembagian air ke petani kan sudah diatur subblok
Peneliti	:	apa menyusun rencana tanam juga?
Informan	:	iya dengan koordinasi sama HIPPA, HIPPA sama subblok
Peneliti	:	Hubungan antara GHIPPA dan HIPPA seperti apa Pak?
Informan	:	kalau diperlukan koordinasi ya kita koordinasi, kondusif la pak pokoknya
Peneliti	:	Bapak sering hadir pertemuan GHIPPA?
Informan	:	Ndak pak, jarang ada pertemuan
Peneliti	:	Apa ada pembinaan dari pemerintah Pak?
Informan	:	ada sih, tapi kurang
Peneliti	:	Kalau sama pemerintah desa gimana pak?
Informan	:	ndak ada, kalau HIPPA tunggal masih ada hubungan dengan desa.
Peneliti	:	Yang bagi air ke petani siapa pak?
Informan	:	Subblok pak.
Peneliti	:	HIPPA perannya apa pak?
Informan	:	Setiap awal musim tanam itu, HIPPA rapat koordinasi sama subblok dan juru. Bahas masalah RTTG, rencana tanam tanaman global. Jadi diatur dulu petani mo nanam apa, sesuaikan sama ketersediaan air.
Peneliti	:	Trus pak?
Informan	:	Ya kita hitung kira-kira ketersediaan air itu berapa, berapa kali

		gilirannya, debitnya, jadi petani menyesuaikan.
Peneliti	:	Apa semua petani patuh sama RTTG?
Informan	:	Ya ndak Pak, banyak yang ndak sesuai juga. Tapi kan itu sudah resiko dia kalau kurang air. Yang penting HIPPA sudah memberi arahan, selebihnya kan urusan petani.
Peneliti	:	Gak ada sanksi ya pak?
Informan	:	Oo ndak ada, kalau urusan perut gini pak, ndak bisa dibuat begitu. Malah bisa rebut. Kan sawah-sawah dia, modal sendiri, kita ndak bisa ikut campur. Cuma kan kita ndak bisa ngasih air diluar jadwal gilirannya, biar jadi masalah dia sendiri. Itu saja.
Peneliti	:	Selain RTTG, kontribusi HIPPA ke pengelolaan air itu apa pak?
Informan	:	Kita bantu memantau, kadang kalau ada konflik dilapangan, kita bantu nyari solusinya. Nyari jalan ke dinas pengairan.
Peneliti	:	Banyak ya pak disini konflik air?
Informan	:	Relative aman disini pak, petaninya luman-luman. Mungkin karena ndak separah di tempat lain ya keringnya. Jadi masih kondusif la.
Peneliti	:	Oya pak, dulu pembentukan HIPPA disini itu seperti apa?
Informan	:	Wah saya lupa itu, tapi yang jelas kan HIPPA itu sudah ada sejak lama. Lupa saya tahunnya, kayaknya ini kan anjuran pemerintah, jadi bagian pemerintah desa, membantu la istilahnya. HIPPA membantu pemerintah desa mengatur pemakaian air irigasi.
Peneliti	:	Yang milih ketua sama pengurus siapa pak?
Informan	:	Ya rapat, ada pemilihannya. Petani kumpul semua sama lo benyo sama aparat desa. Dulu disebutnya lo benyo, sekarang kan subblok ya.
Peneliti	:	Divoting gitu apa pak?
Informan	:	Ya di musyawarahkan, banyak yang ndak mau lo pak jadi ketua atau pengurus HIPPA ini. Kan ndak dapat apa-apa. Ndak ada gaji, ndak ada apa, ndak ada kerjanya juga.
Peneliti	:	Kasnya gimana pak?
Informan	:	Kalau di HIPPA sini ada masih kas nya, subblok masih nyetor walaupun sedikit. Kadang ya 50-100rb per bulan. Masuk kas, dimanfaatkan untuk kebutuhan HIPPA.
Peneliti	:	Apa HIPPA punya program?
Informan	:	Ya ada, sejauh ini programnya paling ya hanya membersihkan saluran. Sama memantau pembagian air. Masih belum berkembang.
Peneliti	:	Yang buat program kerja HIPPA itu siapa pak?
Informan	:	Pengurus HIPPA. Kebetulan disini pengurusnya bisa dibilang aktif la. Walaupun cuma sedikit adalah kegiatannya.
Peneliti	:	Yang milih pengurus dulu siapa pak?
Informan	:	Ya saya sama pak tinggi. Kita pilih orang-orang yang memang

		loyal sama pak tinggi. Mau disuruh jalan kalau ada masalah.
Peneliti	:	Berate orang dekatnya pak tinggi ya pak?
Informan	:	Iya masih kerabat juga.
Peneliti	:	Jangan-janagn bapak juga masih kerabatnya?
Informan	:	Endak juga, bukan saudara hanya teman. Pak tinggi itu teman saya.
Peneliti	:	Kalau dekat kerjanya enak ya pak?
Informan	:	Iya pak, masalahnya ini kerjaan ndak ada uangnya. Jadi ya kita memang pilih orang-orang yang dekat. Jadi walaupun ndak ada uangnya masih mau bantu.
Peneliti	:	Oo iya pak betul juga.
Peneliti	:	Disini iuran air berapa ya Pak?
Informan	:	Kalau MH 20rb/kotak, kalau MK1 35/kotak, kalau MK 2 ya 50 rb/kotak
Peneliti	:	Bayarnya ke subblok ya pak?
Informan	:	Iya ke subblok sama tokang torap itu da. Kan yang ngatur air subblok sama toking torap.
Peneliti	:	HIPPA ikut ngatur pola tanam gak Pak?
Informan	:	Ndak ada itu, biasanya subblok punya pola tanam dapat dari juru.
Peneliti	:	Kalau pemeliharaan saluran gimana pak?
Informan	:	Ya di urus sama subblok juga
Peneliti	:	HIPPA?
Informan	:	Ndak ada pak, ya kalau diajak kerja bakti ya ikut. Tapi kadang kalau saya jalan-jalan pas liat ada saluran yang rusak ya saya tegur subbloknnya. Tapi biasanya sudah tau itu subbloknnya.
Peneliti	:	Iya wes Pak, terima kasih informasinya.

6. Bapak Ta, Umur 43 th, DBMP		
Peneliti	:	Komisi irigasi itu apa ya pak?
Informan	:	Komisi irigasi Kabupaten itu dibentuk oleh Pemerintah kabupaten, pakai Sk Bupati. Ketuanya itu Bappeda, ketua harian 1 kepala dinas pengairan, ketua harian 2 itu kepala dinas pertanian. Sekretaris 1 itu kabid pengairan, sekretaris dua itu kabid sarpras di Bappeda.
Peneliti	:	Tugasnya?
Informan	:	Menetapkan pola tata tanam, membahas dan menyelesaikan masalah irigasi dan pertanian
Peneliti	:	Dalam menetapkan RTTG itu gmn?
Informan	:	Melalui musyawarah HIPPA dan petani, yg dihadiri oleh juru dan ppl. Lalu di bahas di GHIPPA, setelah itu baru dibahas di komisi irigasi, baru ditetapkan pakai SK bupati.
Peneliti	:	Rutin setiap tahun?

Informan	:	Iya rutin, RTTG tahun ini untuk musim tanam tahun depan. setelah Sk bupati turun, baru di sebarakan ke HIPPA melalui GHIPPA.
Peneliti	:	Itu hanya global saja? Kan kondisi geografinya beda?
Informan	:	Permasing-masing wilayah itu ada, tidak hanya RTTG tapi ada rencana tata tanam detail per wilayah. Jadi masing-masing wilayah dilihat debit taun kemaren seperti apa, baru dibuat RTTG nya. Bisa berbeda tergantung kondisi air dan geografinya
Peneliti	:	Seharusnya gimana hubungan GHIPPA dan HIPPA?
Informan	:	Ya terutama koordinasinya untuk pengelolaan air irigasi. GHIPPA untuk saluran sekunder kan yang makai itu HIPPA.
Peneliti	:	Apa GHIPPA terlibat dalam pengaturan airnya?
Informan	:	O ndak, GHIPPA hanya terlibat dalam pola tata tanam, ada tugas sendiri dari juru. Dari rencana tata tanam itu ada debit air keluar masuk sama rencana pendistribusian air. GHIPPA hanya memantau mengantarkan sampai diwilayah tersier, tapi gak punya hak untuk membuka tutup pintu air. Nanti di tersier ada HIPPA yang ngatur melalui subblok.
Peneliti	:	Kalau ada masalah di pendistribusian air gimana?
Informan	:	Ya regulasinya ya petani ke HIPPA, lalu ke GHIPPA ke induk HIPPA baru ke dinas pengairan.
Peneliti	:	Pembinaan dari dinas lebih intens ke HIPPA atau ke GHIPPA?
Informan	:	Ke GHIPPA nya
Peneliti	:	Semua anggota HIPPA itu pasti anggota GHIPPA
Informan	:	Iya pasti
Peneliti	:	Pemilihan ketua dan pengurus GHIPPA gimana?
Informan	:	Ya dipilih dari pengurus HIPPA
Peneliti	:	GHIPPA itu apa harus punya kas juga seperti HIPPA?
Informan	:	Ya di AD/ART HIPPA itu harusnya ada pembagian seperti itu, berapa % untuk operasional mereka sendiri, berapa % untuk pemeliharaan, berapa % petugas dilapangan dan berapa % untuk GHIPPA.
Peneliti	:	GHIPPA kok gak punya kas ya pak ?
Informan	:	Ya itu, karena HIPPA tunggalnya gak nyetor. Karena iuran air kan yang nagih itu subblok. kadang subbloknnya gak nyetor ke HIPPA.
Peneliti	:	Iya, HIPPA gak punya kas..
Informan	:	Iya makanya GHIPPA nya gak punya kas, karena HIPPA juga gak bisa nyetor.

DAFTAR GABUNGAN HIPPA DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2014

No	UPTD	Kecamatan	Desa	G.HIPPA	Nama Ketua G.HIPPA	Nama Daerah Irigasi / Saluran Sekunder	Baku Sawah Ha	Badan Hukum (*)			Klasifikasi HIPPA (*)			KET.
								Sudah	Belum	No./Tahun Pembentukan	Pemula	Madya	Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Besuki	Besuki	Jetis, Besuki, Demung, Kalimas,	Dawuhan Asri	Suwamo	Sal. II Dawuhan Sal. II Biting	461	Sudah		188/279/0001.1/2001 29 - 10 - 2001	-	Madya		
2	Besuki	Besuki, Jatibanteng	Blimbing, Langkap, Kalimas, Jatibanteng	Nogosromo Indah	Aziz Nakip	Sal. II Nogosromo	551	Sudah		188/279/0001.1/2001 29-10-2001	-	Madya		
3	Besuki	Besuki, Jatibanteng	Bloro, Jatibanteng	Al Barokah		Sal. II Setimbo Kn.	160		Belum	- 16-12-1999	Pemula			
4	Besuki	Jatibanteng Banyuglugur	Curahsuri, Lubawang, Bloro	Sumber Rejeki		Sal. II Setimbo Kiri	43		Belum	- 19-07-2000	Pemula			
5	Besuki	Jatibanteng Besuki	Semambung, Widoropayung, Jetis	Air Manunggal	Khairuddin	Sal. II Tunjang	414	Sudah	-	02/HIPPA/2009/PH SIT. 28-07-2008	Pemula			
6	Besuki	Banyuglugur	Lubawang, Kalianget	Sumber Makmur		Sal. II Curahsuri	237		Belum	12-06-2004	Pemula			
7	Besuki	Sumber Malan	Baderan, Kalirej Telogosari	Rengganis		Sal. II Baderan	155		Belum	- 14--06-2004	Pemula			
8	Besuki	Jatibanteng, Besuki	Semambung, Wdr.payung, Jetis, Kalimas, Demung, Besuki	Wirobroto	H. Ismunarso	Sal. II Tunjang Sal. II Biting	886		Belum	- 31-07-2008	Pemula			
			JUMLAH				1.629							

2	Buduan	Suboh Suboh	Buduan Dawuhan	Jaya Abadi Dawuhan Asri	Samhaji Sukandar	Sal. II Nangger Sal. II Cempaluk Sal. II Pegin	2.184 282 145							
			JUMLAH				2.611							
3	Situbondo	Panarukan	Paowan Sumberkolak Kilensari	Sumber Makmu	H. Sobarut	Sal. II Tribungan	562							
		Panarukan	Kendit Klatakan	Tirto Mulyo	Sarno	Sal. II Klatakan / Semekan	124							
		Panarukan	Patokan Pelean Wringin Anom	Gema Tani	H. Doni	Sal. II Wringin Anom	534							
		Panarukan	Pelean Patokan Alasmalang Talkandang	Perkasa	Maryono	Sal. II Pelean	505							
		Panarukan	Patokan Pelean Wringin Anom	Tirto Nadi	H. Muslim	Sal. II Kota Bedah	200							
		Panarukan	Talkandang Alasmalang Pelean Duwet	Luhur	H. Abdullah	Sal. II Alasmalang	443							
		Panarukan	Gelung	Mitra Karya	Ivan	Sal. II Duwet	260							
		Mangaran	Tj. Pecinan	Sami Maju	Surahmat	Sal. II Tanjung Pecina	215							

		Mangaran	Tribungan Olean Semiring	Sadar Tani	Jumarso	Sal. II Sokaan	270						
		Panarukan		Sumber Rejeki		Sal. II Locancang	214						
		Situbondo		Mitra Tani		Sal. II Tenggir							
						Sal. II Gelung	91						
						Sal. II Sipao I	136						
						Sal. II Sipao II	38						
						Sal. II Sipao III	51						
						Sal. II Sumber Kolak	19						
						Sal. II Kalbut	130						
						Sal. II Kendit	160						
						Sal. II Kapong	84						
						JUMLAH	4.036						
4	Panji					Sal. II Tenggir	400						
						Sal. II Tambak Ukir	47						
				Surya Tani		Sal. II Mangaran	300						
				Eka Bakti		Sal. II Panji Utara	106						
				Sumber Rejeki		Sal. II Panji Selatan	237						
				Tani Murni		Sal. II Tanjung Sari	543						
				Sumber Tani		Sal. II Banon	486						

				Tani Makmur		Sal. II Gebangan	426						
				Fajar Tani		Sal. II Landangan	265						
				Tirta Jaya		Sal. II Macan	160						
				Bangkit Jaya		Sal. II Cangkring	156						
						Sal. II Mulje	140						
				JUMLAH			3.266						
5	Arjasa	Arjasa	Curahtatal Jatisari	Tani Makmur	Miswan	Sal. II Jatisari	811	Sudah					Pemula
			Ketoan Lamongan	Utama Karya	H. Mahtum	Sal. II Ketoan	451	Sudah					Pemula
		Jangkar	Sopet Pesanggrahan Kumbangsari Agel	Rantai Alam	Priyo Sutikno	Sal. II Nangger Sal. II Sopet	588 275	Sudah					
		Banyuputih	Banyuputih Sumberrejo Sumberanyar	Tri Bakti	Miftah	Sal. II Banyuputih Sal. II Sumberrejo Sal. II Sumber Anyar	885 791 220	Sudah					
			JUMLAH				4.021						
6	Asembagus			Rukun Tani		Sal. II Palangan	244						
				Sumber Jaya		Sal. II Pedati	122						
				Lestari		Sal. II Bares	657						
				Tohoyyibah		Sal. II Gadung	755						
				Sekonce		Sal. II Bantal	622						
				Palangan Indah		Sal. II Gadingan	70						

			Sumber Urip	Sal. II Rinjing	188								
			Kurnia Bakti	Sal. II Bayeman	771								
				Sal. II Sekarputih	189								
				Sal. II Kalorkoran	202								
				Sal. II Bajulmati	243								
			JUMLAH		4.063								

**DAFTAR INDUK HIPPA DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2014**

No	UPTD	Kecamatan	Desa	I. HIPPA	Nama Ketua I.HIPPA	Nama Saluran Primer	Baku Sawah Ha	Badan Hukum (*)			Klasifikasi HIPPA (*)			KET.
								Sudah	Belum	No./Tahun Pembentukan	Pemula	Madya	Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Situbondo			Jaya Makmur		Sal. I Situbondo	4296							
2	Situbondo			Sapta Tirta		Sal. I Panarukan	2147							
3	Panji			Barokah Tani		Sal. I Kapongan	3524							